



Pemerintah
Kota Salatiga

LAMPIRAN XIX

Peraturan Wali Kota Salatiga
No. 51 Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS

Dinas Komunikasi dan Informatika

RENSTRA
2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISIi

DAFTAR TABELiii

DAFTAR GAMBARiv

BAB I PENDAHULUAN1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 8

1.3 Maksud dan Tujuan 9

1.4 Sistematika Penulisan 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH11

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 11

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika 12

2.2.1 Sumber Daya Manusia 12

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)..... 14

2.2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 30

2.3 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan
Pelayanan Perangkat Daerah 34

2.3.1 Kelompok Sasaran Masyarakat 38

2.3.2 Mitra Perangkat Daerah..... 39

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis 40

2.4.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 40

2.4.2 Isu Strategis..... 41

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN42

3.1 Tujuan 42

3.2 Sasaran 42

3.3 Strategi 44

3.4 Arah Kebijakan..... 44

3.5 Pentahapan Pembangunan Penyelenggaraan urusan yang menjadi
kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika. 47

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN55

4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan 55

4.2 Indikator Kinerja Utama 92

4.3 Indikator Kinerja Kunci 94

BAB V PENUTUP97

5.1 Pedoman Transisi 97

5.2 Kaidah Pelaksanaan 97

5.3 Pengendalian dan Evaluasi97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2024..... 12

Tabel 2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2024 14

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2020-202431

Tabel 2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah42

Tabel 3.1 Teknik MerumuskanTujuan, Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2025-2029.....46

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Indikator Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2025-2029.....46

Tabel 4.1 Program, Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika.....58

Tabel 4.2 Sasaran, Outcome, Output dan Indikator Program.....59

Tabel 4.3 Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan78

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika94

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika.....94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Pikir Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2025-2029.....4

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga 8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2025-2029 adalah dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga untuk lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029. Dokumen RPJMD dijabarkan menjadi Renstra di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai dokumen perencanaan yang bersifat **taktis dan strategis** guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya, Renstra OPD akan dijabarkan menjadi Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat **operasional**.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Pasal 201 ayat (8) bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pemerintah Kota Salatiga pada Bulan November tahun 2024 juga telah melaksanakan pemilihan walikota dan wakil walikota. Hasil pemilihan tersebut telah menetapkan walikota dan wakil wali kota terpilih dan sudah dilakukan pelantikan oleh Presiden-RI pada tanggal 25 Februari 2025. Berdasarkan penetapan dan pelantikan tersebut, Pemerintah Kota Salatiga harus segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima tahun ke depan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Begitu juga dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga yang berfungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian, yang termasuk dalam urusan wajib non-dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023). Urusan ini mencakup pengelolaan informasi publik, teknologi informasi, statistik sektoral, persandian, dan komunikasi masyarakat, yang bertujuan mendukung transparansi, efisiensi

pemerintahan, dan pelayanan publik berbasis digital.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah beserta perangkat daerahnya untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Renstra ini menjadi dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, program, serta kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Keberadaan Dinas Komunikasi dan Informatika sangat penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan berbasis digital. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang terintegrasi dan memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain itu, dinamika lingkungan strategis, perkembangan teknologi informasi yang pesat, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi yang cepat, akurat, dan transparan, serta tuntutan keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjadikan peran Dinas Komunikasi dan Informatika semakin krusial. Diskominfo dituntut untuk mampu mengembangkan infrastruktur TIK yang andal, memperkuat literasi digital masyarakat, meningkatkan kualitas pengelolaan data statistik sektoral untuk mendukung perencanaan pembangunan, serta memastikan keamanan data dan informasi pemerintahan daerah.

Di sisi lain, tantangan seperti ancaman serangan siber, penyebaran informasi hoaks, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur TIK di beberapa wilayah menuntut adanya strategi yang komprehensif, terarah, dan terukur. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2025–2029 merupakan instrumen penting dalam merumuskan arah pembangunan sektor komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian di Kota Salatiga.

Renstra ini juga menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Diskominfo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terkoordinasi, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025–2029, serta selaras dengan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Salatiga terpilih yang telah dilantik pada tanggal 25 Februari 2025. Dengan demikian, keberadaan dokumen Renstra ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas, konsisten, dan berkesinambungan dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang adaptif, inovatif, partisipatif, serta berorientasi pada pelayanan publik berbasis digital.

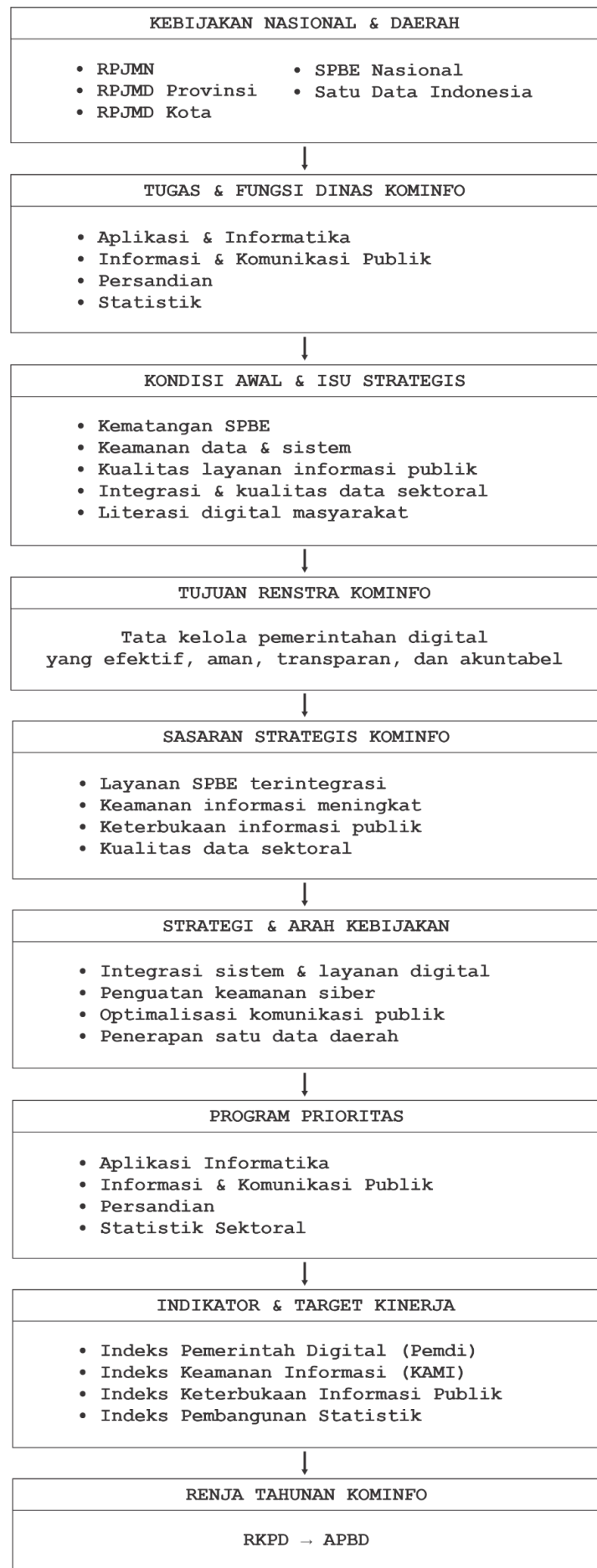
Mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pedoman teknis Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 5/2019 (jo. Permen PPN 6/2020), tahapan umumnya sebagai berikut:

- a. Persiapan: pembentukan tim, rencana kerja, pengumpulan data kinerja, evaluasi RENSTRA sebelumnya, telaah regulasi/urusan.
- b. Rancangan teknokratik RENSTRA: analisis masalah/isu strategis, baseline, proyeksi, opsi strategi, serta kerangka pendanaan indikatif—disusun berbasis data/evidence.
- c. Penyusunan Rancangan RENSTRA K/L: perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program (dan indikator/target 5-tahunan) yang selaras RPJMN dan agenda prioritas nasional.
- d. Penelaahan & penyelarasan dengan Bappenas/Kemenkeu: pembahasan kesesuaian target, indikator, dan pendanaan indikatif; penyesuaian hasil arahan RPJMN.
- e. Finalisasi & penetapan RENSTRA oleh Menteri/Kepala Lembaga (umumnya dengan Peraturan Menteri/Perka), lalu digunakan sebagai pedoman RENJA K/L tahunan.

Penyusunan Renstra melalui proses yang transparan, demokratis, partisipatif. Penyusunannya melibatkan Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kasubbag dan Kelompok Jabatan Fungsional. Alur pikir penyusunannya adalah sebagaimana Gambar 1.1 berikut:



Diagram Visual Alur Pikir Penyusunan Renstra Dinas Kominfo



Gambar 1.1 Alur Pikir Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2025-2029

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 - b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;
 - g. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024;
 - k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
 - m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
-

- n. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Kota Salatiga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 7);
- o. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- p. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra 2025-2029 adalah:

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman resmi bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral, serta persandian. Renstra ini menjadi landasan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan terarah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, berbasis teknologi informasi, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Tujuan penyusunan Renstra 2025-2029 yaitu:

- a. Menjabarkan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Salatiga terpilih ke dalam arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang relevan dengan urusan komunikasi, informatika, statistik sektoral, dan persandian.
 - b. Menjadi pedoman operasional Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun Rencana Kerja tahunan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029.
 - c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terintegrasi, efisien, dan aman sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.
 - d. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik, guna mendukung transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - e. Mengembangkan infrastruktur dan layanan teknologi informasi yang mampu mendukung efisiensi kerja perangkat daerah serta pelayanan publik berbasis digital.
 - f. Memperkuat pengelolaan data statistik sektoral sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah yang akurat dan berbasis data.
-

- g. Memperkuat keamanan informasi dan persandian untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data/informasi pemerintah daerah.
- h. Menjadi instrumen evaluasi kinerja organisasi, sehingga capaian pembangunan bidang komunikasi dan informatika dapat diukur, dinilai, dan ditingkatkan secara berkesinambungan.
- i. Menjadi wujud akuntabilitas publik, dengan memastikan setiap program dan kegiatan Diskominfo berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan mendukung terwujudnya pelayanan publik yang inovatif dan adaptif.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2025-2029.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Bab ini berisi tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan serta kinerja penyelenggaraan Dinas Komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029, juga target kinerja Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-2029.

Bab V Penutup

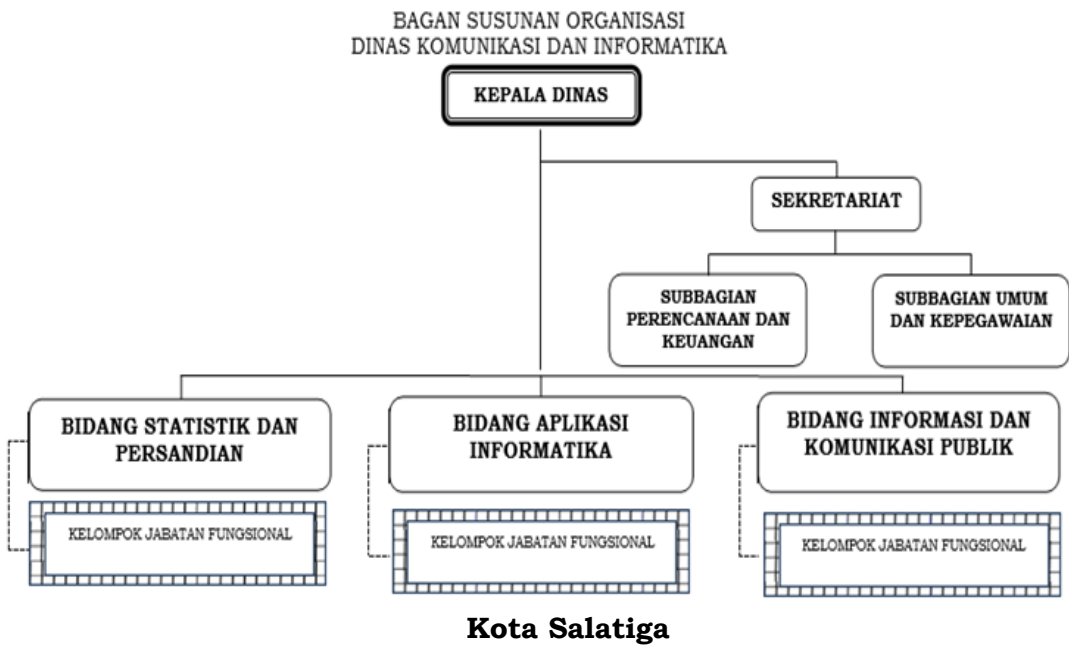
Bab ini memuat diantaranya kesimpulan, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian serta evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga adalah sebagaimana Gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



Berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, tugas Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika adalah membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan tugas dan fungsi tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- 1) merumuskan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- 2) Menyelenggarakan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- 3) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelenggarakan administrasi Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; dan
- 5) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan administratif Dinas dilingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian. Berdasarkan tugas tersebut, Sekretaris memiliki fungsi :

- 1) pengoordinasian perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
- 4) pelayanan administratif Dinas; dan
- 5) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sekretaris dalam menyelenggarakan fungsi tersebut diatas mempunyai uraian tugas :

- 1) mengkoordinasikan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat melalui usulan Bidang sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- 2) mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan;
- 3) menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan;
- 4) menyelenggarakan pelayanan administratif Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 5) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
- 2) pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
- 3) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam menyelenggarakan fungsinya, melaksanakan uraian tugas:

- 1) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- 2) menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan
- 3) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

d. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi



kewenangan Daerah bidang komunikasi dan informatika sub urusan aplikasi informatika.

Bidang Aplikasi Informatika dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
- 2) pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
- 3) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika dalam menyelenggarakan fungsinya, mempunyai uraian tugas:

- 1) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- 2) menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan
- 3) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

e. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang statistik sub urusan statistik sektoral dan bidang persandian sub urusan persandian untuk pengamanan informasi.

Bidang Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan bidang Statistik dan Persandian sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang Statistik dan Persandian sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
- 3) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Bidang Statistik dan Persandian dalam menyelenggarakan fungsinya, mempunyai uraian tugas:

- 1) menyelenggarakan perumusan kebijakan Bidang Statistik dan Persandian sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
 - 2) menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Statistik dan Persandian; dan
-

3) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2024

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)				L	P	Latar Belakang pendidikan/sertifikat
		IV	III	II	I			
1	Kepala Dinas	1				1		S2 Studi Pembangunan, Diklat PIM II
2	Fungsional Madya	1				1		S1 Ilmu Hukum / Sandiman
3	Sekretariat	12						
	- Sekretaris	1				1		S2 Hukum, Pengadaan Barang dan jasa
	- Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan		1			1		S1 Teknik Informatika, Sertifikat Pengadaan Barang Jasa, PIM IV
	- Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian		1			1		S1 Ekonomi Manajemen,PIM IV
	- Staf PNS		6			1	5	S1 Teknik Informatika(1), S1 Ekonomi Manajemen(2), D3 Komputer (1), SMA(1), D3 Hubungan Masyarakat (1)
	- Staf non PNS	3				3		SMA (2), MTS (1)
4	Bidang Statistik dan Persandian	11						
	- Kepala Bidang Statistik dan Persandian	1					1	S2 Manajemen, PIM III, Seritifikat Pengadaan Barang Jasa
	- Staf PNS		8	1		6	3	S2 Hukum ,S1 Ekonomi (1), S1 Persandian (1), D3 Telekomunikasi (1), SMA(3), S1 Statistik (1), S1 Komputer (2)

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)				L	P	Latar Belakang pendidikan/sertifikat
		IV	III	II	I			
	- Staf nonPNS	1				1		S1 Komputer
4	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	17						
	- Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1					1	S1 Manajemen Informatika dan Teknik Komputer, PIM III, Seritifikat Pengadaan Barang Jasa
	- Staf PNS		7	1		4	4	S1 Hukum , S1 Ekonomi Manajemen, S1 Komputer(4), S1 Statistik(1), D3 Ilmu Komunikasi (1)
	- Staf nonPNS	7				5	2	S1(3), D1(2), SMA(2)
5	Bidang Aplikasi Informatika	13						
	- Kepala Bidang Aplikasi Informatika	1				1		S2 Magister Teknologi Informasi, PIM III, Pengadaan Barang Jasa
	- Staf PNS	2	5	5		12	1	S2 Magister Tehnik Informatika , S2 Teknologi Informasi ,S2 Teknik Elektro(1), Seritifikat Pengadaan Barang Jasa, S2 Akuntansi(1), S1 Komputer(3), D3 Komputer(6)
	- Staf non PNS							
Jumlah		7	30	7	0	40	17	
Jumlah Total		56						

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Tabel 2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2024

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi	Jumlah Barang	Tahun Pem- belian	Masa Man- faat
ALAT BESAR						
1	GENSET	YAMAHA	B	1	2020	10
JUMLAH				1		
KENDARAAN DINAS						
2	station wagon (MPV)	Mobil APV merah	B	1	2011	7
3	Station Wagon	TOYOTA AVANZA 1.3 G M/T	B	1	2018	7
4	Station Wagon	TOYOTA INNOVA A/T	B	1	2014	7
5	Station Wagon	Toyota Avanza	B	1	2008	7
6	Station Wagon	Toyota Rush 1.5 G	B	2	2009	7
7	Sepeda Motor	Suzuki FK1100/Smash	KB	1	2008	7
8	Sepeda Motor	Suzuki FW1100	B	1	2010	7
9	Sepeda Motor	Honda Revo	B	2	2013	7
10	Sepeda motor	New Revo Spoke hitam F1	B	1	2014	7
11	Sepeda Motor	Honda WIN	KB	1	2003	7
12	Sepeda Motor	Suzuki/ FW 110 D	B	1	2010	7
13	Sepeda Motor	HONDA/ NF11B2D1	B	1	2012	7
14	Sepeda Motor	Honda Revo CW	B	3	2017	7
15	Sepeda Motor	Honda New Revo X	B	3	2018	7
JUMLAH				20		
ALAT KANTOR						
16	Global positioning system (GPS)	GARMIN 60 CSX	B	1	2013	5
17	Mesin Ketik Elektrik	BROTHER	B	1	2015	5
18	Almari besi	Brother	B	2	2017	5
19	Lemari Besi Pintu Sorong	Futura	B	1	2020	5
20	Rak Besi	Brother	B	2	2019	5

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi	Jumlah Barang	Tahun Pem- belian	Masa Man- faat
21	Rak Besi	Brother	B	4	2017	5
22	Filling cabinet	Brother	B	3	2017	5
23	Filling cabinet	Brother	B	1	2020	5
24	Brangkas	OKIDA	B	1	2017	5
25	Lemari besi/metal pintu sliding kaca	Brother B-304	B	1	2014	5
26	Almari besi	Data file	B	1	2011	5
27	Almari arsip besi	Brother b-204	B	2	2017	5
28	Lemari Kayu	Pintu dorong/besar	B	2	2013	5
29	Rak Besi	Brother	B	1	2002	5
30	Rak Besi	Brother	B	4	2017	5
31	Filling besi/metal	Brother	B	1	1988	5
32	Filling Kabinet	IKIMARU I104	B	1	2011	5
33	Filling Kabinet	Brother BS-104	B	1	2014	5
34	Filling Kabinet 4 rak	Brother	B	1	2016	5
35	Filling Kabinet	Brother b-104	B	2	2017	5
36	IP Camera Hikvision + Set Up (CCTV)	CCTV Data Center	B	2	2019	5
37	NVR Hikvision (CCTV) + Kabel HDMI + UTP Kabel 60 m	CCTV Data Center	B	1	2019	5
38	Televisi LG 43 HD (CCTV)	CCTV Data Center	B	1	2019	5
39	Mesin penghancur kertas	360/258/550	B	1	2013	5
40	Mesin penghancur kertas	Krisbow	B	1	2018	5
41	Mesin absensi	Finger plus FID 92	B	1	2017	5
42	Alat kantor lainnya (LCD proyektor)	EPSON EB EX200	B	1	2014	5
43	Papan informasi	Kayu	KB	1	2004	5
44	Vacum Cleaner	Krisbow	B	1	2020	5
45	Digital speaker Behringer	Behringer	B	1	2020	5

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi	Jumlah Barang	Tahun Pem- belian	Masa Man- faat
46	TOA Subwoofer	TOA	B	1	2020	5
47	Standmic Table	Krezt NB-210	B	2	2020	5
48	Stand Mic Standing	Krezt NB-200	B	2	2020	5
49	Sound Mixing 16 Channel Yamaha	Yamaha	B	1	2020	5
50	Penghancur kertas Krisbow	Krisbow	B	2	2020	5
51	PLUSTEK Scanner Mobile	Plustek	B	1	2020	5
52	Rak buku pintu sleding	S tundun	B	2	2016	5
53	Rak Buku	Besi	B	1	2009	5
54	CCTV dan Kelengkapannya	HIKVISION DS- 7732NI-E4	B	1	2017	5
55	CCTV dan Kelengkapannya	HIKVISION	B	1	2021	5
56	Mesin Fogging Desinfektan	Red Fox RF DFM 100	B	2	2021	5
57	UPS		B	1	2024	5
JUMLAH				61		
ALAT PENDINGIN						
57	AC	TUQX/AS09T	B	2	2013	5
58	AC	Daikin	B	2	2017	5
59	AC	Panasonic	B	1	2019	5
61	Alat Pendingin (DataCenter)	Daikin	B	2	2019	5
62	AC Split Command Center	DAIKIN STC35NV	B	5	2019	5
63	AC Cassette Command Center	DAIKIN SCNQ26MVWL	B	6	2019	5
64	AC + kelengkapannya	Panasonic 1,5 pk	B	1	2014	5
65	AC Panasonic 2 PK	Panasonic	B	3	2020	5
66	AC Panasonic 1 PK	Panasonic	B	3	2020	5
67	Kipas Angin	Cosmos	B	1	2020	5
JUMLAH				27		

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi	Jumlah Barang	Tahun Pem- belian	Masa Man- faat
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA						
68	Meja Operator Command Center	Multipleks 18 mm lapis HPI, rel laci, engsel soft	B	6	2019	5
69	Meja 1/2 Biro(meja staf)	Jati	B	4	2011	5
70	Meja 1/2 Biro	jati	B	1	2014	5
71	Meja 1/2 Biro	kayu	B	1	2015	5
72	Meja 1/2 biro	kayu	B	1	2009	5
73	Meja kerja 1/2 biro	kayu	B	6	2007	5
74	Meja kerja 1/2 biro	kayu	B	1	2005	5
75	Kursi Kerja Putar	Indovickers Nixie	B	6	2019	5
76	Sofa 3 Seater	Indovickers Cubic	B	1	2019	5
77	Meja Kerja 1/2 biro	Kayu	B	7	2016	5
78	Mesin penghisap debu		B	1	2018	5
79	Kursi Kerja Putar	hidrolis	B	1	2016	5
80	Kursi lipat	Futura	B	37	2017	5
81	Tape Deck	Polytron	B	1	2004	5
82	Tape Recorder	Sony TCM	B	1	2005	5
83	Salon Link Master	CSR 1010	B	2	2008	5
84	Loudspeaker	Behringer B112D Active 1000 W 2- Way 12'PA	B	2	2016	10
85	Microphone	SMP Pro MC01 (Mic Condensor)	B	1	2016	10
86	Microphone	SMP Pro MC01 (Mic Condensor)	KB	2	2016	10
87	Tangga Lipat	Liveo	B	1	2014	5
88	Tandon air	Penguin	B	1	2018	5
89	Radio Compo	Polytron	B	1	2017	5
90	Televisi	21"	KB	1	2005	5
91	LCD TV	Sony	B	1	2014	5
92	TV LED 45"	Sharp	B	1	2017	5
93	Smart TV	Samsung	B	1	2017	5

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi	Jumlah Barang	Tahun Pem- belian	Masa Man- faat
94	Wireless Sound system	Black 15AU	B	1	2017	5
95	Pocket Camera	Olympus	B	1	2018	5
96	Handycam plus Steady Stabilizer	Go Pro Hero Brica	B	1	2019	5
97	Alat pemadam kebakaran	Kapasitas 4.5	B	1	2014	5
98	Alat pemadam kebakaran	Kapasitas 4.5	B	1	2018	5
100	Meja Kerja Pejabat Ess III	Kayu	B	4	2017	5
101	Meja Kerja Pejabat Ess III	Kayu	B	1	2019	5
102	Meja Kerja Pejabat Ess IV	Kayu	B	8	2017	5
103	Meja kerja biro sedang es IV	JATI	B	1	2015	5
104	Meja Biro besar	Kayu	B	1	2017	5
105	Meja Kerja	Kayu	B	1	2005	5
106	Meja Kerja	Kayu	KB	5	2000	5
107	Meja Staf	Kayu	B	4	2019	5
108	Meja Staf	Kayu	B	5	2017	5
109	Meja Sidang Undangan	Kayu	B	3	2012	5
110	Meja kursi tamu	Kayu	KB	2	2002	5
111	Meja kursi tamu/sofa	motif bunga hijau	B	1	2012	5
112	Meja kursi tamu	Kayu	B	1	2017	5
113	Sofa	Model 211	B	1	2020	5
114	Meja kursi tamu + kaca (meja k1, kurs p, kursi pend 3)	Kayu	B	1	2014	5
115	Kursi tamu 1 (innola sofa)	Innola	B	4	2017	5
116	Sofa Tamu		B	1	2019	5
117	Kursi Kerja Eselon II	Doroty DD 13	KB	1	2012	5
118	Kursi kerja eselon II	Bellva	B	1	2017	5

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi	Jumlah Barang	Tahun Pem- belian	Masa Man- faat
119	Kursi Keja Esselon III	Bellva	B	6	2017	5
120	Kursi Keja Esselon IV	Bellva	B	9	2017	5
121	Kursi Kerja Eselon IV	BELLVA	B	1	2016	5
122	Kursi Kerja Staf	Brother	B	5	2014	5
123	Kursi staf	Futura	B	6	2019	5
124	Kursi staf	Futura	B	23	2017	5
125	Meja Rapat		B	10	2008	5
126	Meja Kerja Kayu		B	2	2007	5
JUMLAH				203		
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR						
125	Bracket	Besi	B	1	2017	5
126	Backdrop utama	kayu	B	1	2018	5
127	Variasi plafon backdrop	plafon	B	1	2018	5
128	Meja pelayanan 2 muka	kayu	B	1	2018	5
129	Skesel samping	kayu	B	1	2018	5
130	Huruf stainless	besi	B	1	2018	5
131	Kursi customer	besi	B	1	2018	5
132	Sketsel belakang	kayu	B	1	2018	5
133	Pasangan perkuatan backdrop	besi	B	1	2018	5
134	Camera Digital DSLR	Canon EOS 1300D	B	2	2017	5
135	Camera Digital	CANON IXUS 115 HS SILVER	B	1	2013	5
136	Alat kantor lainnya (LCD proyektor)	Epson	B	1	2018	5
137	Barcode scanner	honeywell quantum	B	1	2017	5
138	TV Wall Command Center	TOSHIBA	B	8	2019	5

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi	Jumlah Barang	Tahun Pem- belian	Masa Man- faat
139	TV Interactive Command Center	Samsung Flip Interactive	B	1	2019	5
140	TV Display Command Center	HIKVISION Smart Interctive Display	B	1	2019	5
141	Sound Portable Command Center	JBL Portable Speaker EON 280 P	B	1	2019	5
142	Sound Portable Command Center	JBL Portable Speaker EON 280 P	B	1	2019	5
143	Wireless Microphone	AKG Wireless WMS40	B	2	2019	5
144	Digital Signage	Canvas	B	1	2019	5
145	Voice Recorder	Sony JBL Flip	B	2	2019	5
146	Clip On	Ashley M114 Clip On	B	10	2019	5
147	Videotron Selasar Kartini	Videotron	B	1	2019	5
148	Videotron Blotongan	Videotron	B	1	2020	5
149	Videotron Lapangan Pancasila	Videotron	B	2	2019	5
150	Audio Videotron Selasar Kartini	Column Speaker	B	2	2020	5
151	Audio Videotron Selasar Kartini	Speaker Bracket	B	2	2020	5
152	Audio Videotron Selasar Kartini	Network Switch	B	1	2020	5
153	Audio Videotron Selasar Kartini	HDMI to HDMI extractor	B	1	2020	5
154	Audio Videotron Selasar Kartini	Audio Amplifier	B	1	2020	5
155	Audio Videotron Selasar Kartini	Cloud Volume Control	B	1	2020	5
156	Audio Videotron Selasar Kartini	Client App	B	1	2020	5

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi	Jumlah Barang	Tahun Pem- belian	Masa Man- faat
157	Audio Mobil Penyebarluasan Informasi	Ampli TOA ZA2503	B	1	2020	5
158	Audio Mobil Penyebarluasan Informasi	Torong TOA ZH6155	B	1	2020	5
159	Audio Mobil Penyebarluasan Informasi	Cross Bar TOA	B	1	2020	5
160	Audio Mobil Penyebarluasan Informasi	Inverter 1000W PSW Souer	B	1	2020	5
161	Video Wall 55 inch	55BDL3005X	B	12	2020	5
162	Video Wall Processor 12 Input	CH-AT1616/121- 120	B	2	2020	5
163	Front Access Bracket	BT-8310	B	24	2020	5
164	Control Versatile	Elektronik	B	1	2020	5
165	Apple iPad Air 3 Wifi 256 GB Gold	Apple iPad Pro 4th	B	2	2020	5
166	Dongle Instashow	WDC10	B	1	2020	5
167	Standing Close Rack Glass Door	IR9027G	B	1	2020	5
168	Interactive Flat Panel	RP6501K	B	1	2020	5
169	OPS Core I5 7200	IE1002	B	1	2020	5
170	Floor Standing Trolley	Elektronik	B	1	2020	5
171	Speaker Integrated Collab System	Z-5B-HX2	B	2	2020	5
172	Dual Channel Power Amplifier	DA-1250D-AS	B	1	2020	5
173	Wireless Dual Band Access Point	DAP-2610	B	1	2020	5
174	19 Inch Wallmount Rack Single	WIR6008S	B	1	2020	5
175	Liebert ITA2	ITA2	B	1	2020	5
176	PC XPS 8930	WIN 10 PRO	B	2	2020	5

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi	Jumlah Barang	Tahun Pem- belian	Masa Man- faat
177	Signage Solutions D-Line	55DBL4050D	B	12	2020	5
178	UPS (CS1238)	(CS1238)	B	2	2020	5
179	Microphone Wireless	WS-5265	B	3	2020	5
180	Chairman Unit with Mic and Battery	TS-801	B	4	2020	5
181	Delegate Unit with Mic and Battery	TS-802	B	14	2020	5
182	Battery Charger (BC-900)	BC-900	B	1	2020	5
183	Infrared Transmitter	TS-905	B	4	2020	5
184	Central Unit (TS- 800)	TS-800	B	1	2020	5
185	Studio Conference Soundbar Speaker	7200-85839-102	B	1	2020	5
186	Column Speaker		B	2	2020	5
187	Speaker Bracket		B	2	2020	5
188	Network Switch		B	1	2020	5
189	HDMI to HDMI Extractor		B	1	2020	5
190	Audio Amplifier		B	1	2020	5
191	Client App2		B	1	2020	5
192	Sound System	Sony Alpha A711 Kit SEL2870	B	1	2020	5
193	Tripod	Tripod Libec Video Tripod 650 EX	B	1	2020	5
194	Action Camera	Vidcam 4K 360	B	1	2020	5
195	Web Camera	Webcam Logitech	B	2	2020	5
196	Microphone Wireless	MIC Condensor AT 2021	B	9	2020	5
197	Headphone	Headphone K240 MKII	B	9	2020	5
198	Audio Mixer	Audio Mixer Airmate	B	2	2020	5
199	Telereporter	Telereporter GS- MPI004	B	1	2020	5

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi	Jumlah Barang	Tahun Pem- belian	Masa Man- faat
200	Sound System	Sound System Portable	B	2	2020	5
201	Kabel Tone	Kabel Tone Checker	B	1	2020	5
202	Mixer Sound	Mixer Sound Mini	B	1	2020	5
203	Drone	DJI Mavic Smart Controller Drone	B	1	2020	5
204	Microphone Type 1	Sennheiser	B	1	2004	4
205	Notebook	Lenovo x1 carbon i7	B	1	2020	4
206	Tablet PC	Samsung Galaxy Tab	B	1	2020	4
207	Microphone Type 2	Sennheiser	B	1	2004	4
208	Audio Processor MDX2600 Pro XL	MDX2600 Pro XL	B	1	2010	10
209	Sound System Indoor	FirstClass A4400	B	1	2022	5
210	Tripod Camera	Fotopro X-2 Lite	B	1	2021	5
211	Videotron Pasar Sapi	Videotron	B	1	2020	5
212	Tripod		B	2	2022	5
213	Card SLC 16 untuk Telepon PABX		B	1	2008	5
214	Card PABX + kabel	KX-TD	B	2	2011	5
215	Card Panasonic	KX-TDA0174XJ 16 line	B	1	2018	5
216	Port Single Line Extension		B	1	2016	5
217	Pesawat Telephone	Panasonic	B	1	2017	5
218	Mesin fax		B	2	2011	5
219	Pesawat Telepon	Panasonic KX T7630	B	2	2020	5
220	Pesawat Telepon	Panasonic KX T7665	B	3	2020	5
221	Mesin Fax KX 987	KX 987	B	1	2020	5
222	Handy Talky	Baofeng	B	8	2018	5
223	Mesin fax		B	1	2018	5

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi	Jumlah Barang	Tahun Pem- belian	Masa Man- faat
224	Jammer	1 unit	B	1	2018	5
225	Surveilance/Pende teksi Sinyal	3 unit	B	3	2018	5
227	Transceiver Radio Rig Allinco DR	Allinco	B	1	2020	5
228	Antena Telex High Gain	Telex	B	1	2020	5
229	Power Supply Unit 30 A		B	2	2020	5
230	Accu Kering 45 ah		B	1	2020	5
231	Antena Indoor		B	1	2013	4
232	Antena Outdoor		B	1	2013	4
233	Radio Receiver	Teac/T-R 640	B	1	2004	4
234	Radio HF / MF	LG	B	1	2016	5
235	Exiter	RVR/EMS	KB	1	2004	5
236	Pemancar mini exiter		B	1	2009	10
237	Lampu Pemancar	EIMAAC 1500 AI	KB	1	2010	10
238	Penangkal Petir		B	1	2004	5
239	Pemancar FM Quark Falcon dan kelengkapannya		B	1	2014	10
240	Pemancar FM	Quark Falcon 1000	B	1	2016	10
JUMLAH				245		
KOMPUTER						
241	PC ALL IN ONE	Lenovo V310Z	B	7	2017	4
242	Personal Komputer	Acer Aspire TC 708	B	2	2017	4
243	PC unit	HP Slim Line 290	B	2	2018	4
244	PC unit	Dell Vostro	B	2	2018	4
245	P.C Unit	HP COMPAQ PRO 4300 AIO	B	1	2013	4
246	P.C Unit	Lenovo S500	B	1	2017	4
247	PC ALL IN ONE	LENOVOC 360	B	1	2014	4
248	PC unit + monitor LED	HP 251-014 L	B	1	2015	4
249	PC unit + monitor LED	ASUS PRO D310 MT	B	1	2016	4

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi	Jumlah Barang	Tahun Pem- belian	Masa Man- faat
250	PC unit	Acer	B	1	2008	4
251	Komputer Maintenance	Tool Kit	B	1	2013	4
252	PC unit		B	1	2008	4
253	Komputer	LG	B	1	2005	4
254	Komputer	DELL	B	1	2012	4
255	PC unit	HP 200 G3 AIO	B	8	2019	4
256	PC unit	ASUS R5-2400G	B	2	2019	4
257	PC unit	HP Programmer 4EB06AA	B	3	2019	4
258	Laptop	HP Pavillion x360	B	6	2017	4
259	Laptop	Toshiba	B	1	2012	4
260	Laptop	Fujitsu	B	1	2013	4
261	Laptop	Sony	B	1	2013	4
262	Laptop	Dell	B	1	2013	4
263	Laptop	Asus	B	1	2015	4
264	Laptop	Lenovo	B	1	2015	4
265	Laptop	DELL inspration 14 5458	B	1	2017	4
266	Laptop (Petugas Akntansi)	HP 240 G6	B	1	2018	4
267	Laptop	DELL G3 15-3579	B	1	2018	4
268	Laptop	Acer Swift SF314	B	1	2018	4
269	Laptop	ASUS ROG GL503GE	B	1	2019	4
270	Laptop	HP 240 G6	B	2	2019	4
271	Notebook	ASUS STAR GREY	B	1	2019	4
272	Notebook	HP 11 AB03 TU	B	1	2017	4
273	Notebook	HP BS007TX	B	2	2017	4
274	Netbook	Asus	B	1	2016	4
275	NETBOOK	LENOVO S20-30	B	1	2014	4
276	NETBOOK	Asus X200 MA lcd 11,6	B	1	2015	4
277	PC Unit	DELL Inspiron 3471	B	2	2020	4
278	PC Unit	DELL Inspiron G5- 5000	B	1	2020	4
279	PC Unit	DELL Poweredge T140 E-2124	B	1	2020	4

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi	Jumlah Barang	Tahun Pem- belian	Masa Man- faat
280	PC Unit	PC Dell Optiplex 5060	B	3	2020	4
281	PC Unit	DELL Inspiron G5- 5000	B	2	2020	4
282	PC Unit	HP Pavilion TP 01- 0101d	B	2	2020	4
283	Tablet PC	Apple iPad Pro 4th Gen 2020	B	1	2020	4
284	Tablet PC	Samsung Galaxy Tab S4	B	1	2020	4
285	Laptop/PC	Dell Vostro 5490 i7	B	1	2020	4
286	Laptop	Laptop Dell Latitude	B	1	2020	4
287	Laptop	Laptop Core 17	B	1	2020	4
288	PC Unit	ACER Aspire 3 Obsidian Black	B	1	2020	4
289	Komputer Desktop	HP Pavilion 110- 406d	B	1	2016	4
290	Tablet PC	Samsung Galaxy Tab S5e	B	2	2019	4
291	Tablet PC	Samsung Tab S3	B	1	2018	4
292	Jaringan komputer	Elektronik	B	1	2015	4
293	Peralatan jaringan kmputer	Elektronik	B	1	2016	4
294	Media Converter	TPLink Gigabit Single Mode	B	16	2017	4
295	Hard Disk Internal Western	2TB	B	1	2013	4
296	Hardisk Eksternal		B	1	2016	4
297	Antena Power Beam M5 400	Power Beam	B	3	2020	4
298	Router Mikrotik	Mikrotik	B	1	2020	4
299	Box control panel		B	1	2020	4
300	Switch Hub Gigabit 5 Port		B	1	2020	4
301	UPS + keyboard	Prolink	B	1	2014	4

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi	Jumlah Barang	Tahun Pem- belian	Masa Man- faat
302	Komputer Server	BA 028/26/IV/2019	B	2	2017	4
303	Server HP	Proliant DL180	B	2	2017	4
304	Server		B	4	2010	4
305	Router Cloud	CCR1009-7G-1C- 1S	B	3	2017	4
306	Wireless Router Indoor	TP Link AC1750 Dual Band	B	3	2017	4
307	Router Mikrotik	Mikrotik RB951ui- 2HND	B	10	2017	4
308	Router Board Mikrotik	Mikrotik Hex S	B	44	2018	4
309	Router Cloud	Mikrotik CR125- 24G-15-2HnD	B	2	2018	4
310	Router mikrotik	Mikrotik	B	1	2013	4
311	Router CC		B	2	2016	4
312	Switch Hub	TP Link 24 Port Gigabite	B	2	2017	4
313	Switch Hub	TP Link 24 Port Gigabite / Rackmount Switch	B	1	2019	4
314	Switch Hub	Mikrotik 24 portGigabit Ethernet Switch	B	1	2019	4
315	HUB (switch)	Elektronik	B	1	2004	4
316	Modem SMS Gateway	Maestro M 100	B	2	2018	4
317	Transceiver Mikrotik	Mikrobits SFP+Transceiver	B	5	2017	4
318	Routerboard CCR1072	CCR1072	B	1	2020	4
319	Routerboard CRS326-24S	CRS326-24S	B	1	2020	4
320	Mikrotik S+Rj10	Mikrotik	B	10	2020	4
321	OutdoorWireless	Mikrotk RB800(4bh APA+B+G)	B	1	2017	4
322	Acces point indoor		B	10	2013	4
323	Fiber Optic Splicer		B	1	2019	4

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi	Jumlah Barang	Tahun Pem- belian	Masa Man- faat
324	Router		B	2	2019	4
325	Cloud Core Router		B	1	2019	4
326	Cloud Core Switch		B	2	2019	4
327	OTB Rackmount		B	2	2019	4
328	ODP Wallmount		B	2	2019	4
329	Media Converter Mount		B	13	2019	4
330	Set Direct Cable		B	5	2019	4
331	Komputer Mainframe /server + chasis		B	1	2013	
332	Hard disk 6TB		B	1	2018	4
333	Server	HPE DL380 GEN10	B	3	2019	4
334	Server	HPE Nimble Storage HF20	B	1	2019	4
335	Server	HPE DL20 Gen10	B	1	2019	4
336	Server	HPE Flexfabric 5700	B	2	2019	4
337	Server	VMWARE vCenter	B	1	2019	4
338	Server	VEEAM Avaibility Suite	B	4	2019	4
339	Storage	HPE MSA 2050 SAN	B	1	2019	4
340	Rak Server	VERTIV S27 Series Rack	B	1	2019	4
341	UPS (Komputer Mainframe)	APC Smart-UPS	B	1	2019	4
342	Rack Server	Indorack Standing Close Rack	B	2	2017	4
343	Hardware anjungan infrmasi		KB	1	2012	4
344	KIOS/K TRUKIOSK combo (anjungan)		KB	2	2013	4
345	Hardisk Eksternal	My Passport	B	2	2017	4
346	Scanner		B	1	2018	4
347	Monitor LED	BENQ Led Monitor	B	1	2018	4

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi	Jumlah Barang	Tahun Pem- belian	Masa Man- faat
348	Scanner Countinous	Epson	B	1	2014	4
349	Scanner	Epson	B	1	2012	4
350	Scanner	Plustek A320L	B	1	2019	4
351	Printer Laser	Brother MFC-L2740 DW	B	1	2019	4
352	Printer 3 in 1	Epson L3150	B	1	2019	4
353	Printer All In One	Epson L360	B	4	2017	4
354	Printer All In One	Epson L805	B	1	2018	4
355	Printer All In One	Epson Workforce	B	1	2018	4
356	Printer All In One	Brother T700W	B	1	2017	4
357	Printer Ink jet	Canon Pixma MP287	B	1	2017	4
358	Printer Laser Jet	Canon LBP 6030	B	1	2017	4
359	Printer Multifungsi	Canon Mx537	B	1	2014	4
360	Printer	BROTHER MFC J200	B	1	2015	4
361	Printer Laser	brother	B	2	2012	4
362	Portable scanner	iScan	B	1	2017	4
363	Printer Inkjet Canon Pixma IP7270	Canon Pixma IP7270	B	1	2017	4
364	Printer Epson Eco Tank L5190	Epson Eco Tank L5190	B	4	2020	4
365	Printer Epson L3110 Eco Tank	Epson L3110 Eco Tank	B	1	2020	4
366	HD External 2 TB	Elektronik	B	2	2020	4
367	USB converter adapter	Elektronik	B	2	2020	4
368	USB bluetooth adapter	Elektronik	B	4	2020	4
369	USB audio adapter	Elektronik	B	4	2020	4
370	VGA Card	Geforce GTX 1050	B	2	2017	4
371	UPS	Prolink	B	11	2017	4
372	UPS	CP 700	B	1	2012	4
373	UPS	Prolink	B	3	2013	4
374	UPS	Prolink	B	4	2016	4
375	UPS	Prolink	B	1	2012	4

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi	Jumlah Barang	Tahun Pem- belian	Masa Man- faat
376	UPS	PROLINK Super Fast Charging	B	8	2019	4
377	Monitor LED	LG	B	2	2019	4
378	Monitor Curved Full	SAMSUNG	B	1	2019	4
379	Rack server	Elektronik	B	1	2012	4
380	Printer	Epson L5190	B	1	2021	4
381	UPS	BVX700LUI-MS	B	1	2021	4
382	Video Kamera		B	2	2022	4
383	Router		B	14	2024	4
384	Hardisk Eksternal		B	1	2024	4
385	Monitor		B	1	2024	4
JUMLAH				363		
386	CCTV	HIKVISION	B	1	2018	5
JUMLAH ALAT KESELAMATAN KERJA				1		
JUMLAH TOTAL				899		
GEDUNG						
1	Gedung kantor		B	1	2009	50
2	Bangunan Gedung RSPD		B	1	2010	48
				2		

Sumber: Pengurus Barang

2.2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Salatiga berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kota Salatiga periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun						Pertumbuhan Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RENSTRA											
1	Tingkat Ketersediaan Informasi Publik	%	93.18	93.86	97.73			0.73	4.12			2.43
	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik					100	100			2.32	0.00	1.16
2	Tingkat Pengembangan Layanan E-Government dan Smart City	%	83	85	87			2.41	2.35			2.38
	Indeks SPBE	%		2.34	2.84	3.26	3.64		21.37	14.79	11.66	15.94
4	Persentase Ketersediaan Data Statistik	%	81.43	92.38	100	94	100	13.45	8.25	-6.00	6.38	5.52
5	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	%	78.59	75.4	70.85	80	92	-4.06	-6.03	12.91	15.00	4.46

Sebagian besar indikator telah tercapai dengan baik. Realisasi tingkat ketersediaan informasi publik pada tahun 2021 sebesar 93,86% dan ini melebihi target tahun 2021 yaitu sebesar 90%. Namun hal tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tingkat keterbukaan informasi publik yang informatif (96%). Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika lainnya yang mencapai target/melebihi target adalah persentase tersedianya data statistik dengan realisasi tahun 2021 sebesar 92,38% dan ini lebih tinggi daripada target tahun 2021 yaitu sebesar 90%. Hal tersebut menunjukkan meningkatnya kualitas data statistik sektoral dan publikasi data statistik sektoral kepada masyarakat.

Indikator kinerja yang belum tercapai adalah tingkat pengembangan layanan *e-government* dan *smart city*. Target tahun 2021 adalah sebesar 91%, tapi yang tercapai sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena Indeks SPBE Kota Salatiga mengalami penurunan dengan nilai 2,34 (kategori Cukup) sehingga masih membutuhkan dukungan program, kegiatan dan subkegiatan serta anggaran untuk mencapai kategori baik (Indeks SPBE 2,6). Pencapaian kinerja Urusan Persandian masih kurang maksimal yaitu 78,56% pada tahun 2021. Nilainya lebih rendah daripada target tahun 2021 (90%). Hal ini disebabkan karena belum adanya pemahaman OPD terhadap pentingnya keamanan informasi. Indeks KAMI Kota Salatiga baru pada kategori Layak. Untuk mencapai kategori Baik, maka dibutuhkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan untuk meningkatkan tata kelola terkait pengamanan informasi.

a. Kinerja urusan Persandian

Pelayanan urusan persandian untuk keamanan informasi di Pemerintah Kota Salatiga, yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, merupakan komponen krusial dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024, Kota Salatiga mencapai indeks keseluruhan 3,64 dengan predikat "Sangat Baik", menunjukkan kemajuan signifikan dari tahun sebelumnya di mana skor 2023 mencapai 3,26, meskipun domain manajemen SPBE masih rendah di angka 2,27 dan sub-aspek audit Teknologi Informasi

dan Komunikasi (TIK) hanya 1,67, yang mencerminkan kelemahan dalam pengelolaan risiko keamanan informasi.

Laporan Akhir Audit TIK Tahun 2023 mengungkapkan bahwa meskipun tata kelola TIK mengikuti standar Perpres 95 Tahun 2018, terdapat temuan kritis seperti dokumen arsitektur SPBE yang belum terupdate, tim SPBE yang belum berfungsi optimal, dan manajemen risiko keamanan informasi yang belum terlaksana secara penuh, termasuk kerawanan dalam transaksi informasi serta pengendalian internal TIK yang masih rendah efektivitasnya. Selain itu, Laporan Hasil Penilaian Mandiri Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Tahun 2024 untuk sistem elektronik berdasarkan SNI ISO/IEC 27001:2013, menunjukkan tingkat kematangan keamanan informasi pada Level II-III (Diterapkan/Managed), dengan skor rendah di area manajemen risiko (identifikasi dan penanganan risiko belum komprehensif), kerangka kerja keamanan informasi (pengendalian akses dan operasi keamanan lemah), pengelolaan aset informasi (inventarisasi aset dan perlindungan fisik kurang), serta teknologi informasi dan keamanan (kriptografi dan keamanan jaringan belum optimal), meskipun kategori sistem elektronik tergolong strategis dengan risiko tinggi jika terganggu.

Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2023 tentang SMKI SPBE menyediakan landasan hukum dengan menjamin CIA (*Confidentiality, Integrity, Availability*) ditambah dengan keaslian dan nirpenyangkalan, mencakup standar teknis enkripsi, autentikasi, dan penanganan insiden, didukung SOP insiden siber yang berfokus pada identifikasi, analisis, dan mitigasi melalui flowchart, meskipun implementasinya belum maksimal seperti kurangnya latihan secara rutin.

Data anggaran pada Tabel 2.4 Tahun 2017-2021 menunjukkan alokasi untuk program terkait persandian, seperti Program Pengembangan Komunikasi, Informatika, dan Persandian (rata-rata realisasi 97,07% pada 2020) dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (99,75% pada 2021), tetapi rasio realisasi keseluruhan bervariasi (misalnya 83,39% untuk administrasi umum pada 2021), menandakan efisiensi anggaran yang baik namun perlu peningkatan untuk infrastruktur keamanan. Secara keseluruhan, kinerja persandian menunjukkan kekuatan dalam kebijakan dan

peningkatan indeks SPBE, tetapi kelemahan di implementasi operasional, SDM, dan evaluasi real-time, dengan tantangan ancaman siber yang meningkat dan literasi digital rendah, sebagaimana diatur dalam Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021. Hal terjadi juga sebagai akibat dari adanya kesenjangan anggaran antara RPJMD dengan anggaran yang ditetapkan dalam DPA, juga adanya imbas terhadap refocusing terhadap anggaran.

Kesenjangan finansial ini merupakan akar masalah yang paling mendasar dari banyak kelemahan yang ditemukan dalam laporan-laporan lainnya. Kurangnya pendanaan yang memadai menjelaskan mengapa program-program krusial seperti audit keamanan, pengembangan kompetensi SDM dan penyusunan DRP tidak dapat terlaksana secara optimal. Dengan anggaran yang terbatas, mustahil untuk mencapai tingkat kematangan keamanan informasi yang ditargetkan. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi anggaran yang menjadikan program persandian sebagai prioritas strategis.

2.3 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Kekuatan utama yang dimiliki Diskominfo Kota Salatiga adalah:
 - 1) Kelembagaan dan koordinasi yang jelas. Sudah ada pembagian kewenangan antara Diskominfo dan Prokompim Setda sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi.
 - 2) Koordinasi internal yang solid. Alur kerja antarbidang berjalan baik, mendukung efektivitas pelaksanaan program.
 - 3) Sinergi eksternal dengan instansi vertikal. Terjalin koordinasi aktif dengan BPS (statistik) dan BSSN (persandian/keamanan siber).
 - 4) Kapasitas keamanan siber. Telah terbentuk Salatiga-CSIRT sebagai tim tanggap insiden siber daerah.
 - 5) Dukungan regulasi daerah. Telah diterbitkan Perwali, Keputusan, dan SOP yang memperkuat tata kelola urusan komunikasi, informatika, statistik sektoral, dan persandian.
 - 6) Forum koordinasi data dan informasi. Telah terbentuk Forum Satu Data Salatiga dan sekretariatnya untuk integrasi data daerah.
 - 7) Partisipasi masyarakat dalam komunikasi public. Adanya FK-
-

Metra dan KIM di tingkat kelurahan sebagai mitra strategis dalam literasi dan diseminasi informasi publik.

- 8) Kanal informasi resmi yang terpercaya. Media sosial Diskominfo sudah terverifikasi sehingga kredibilitas komunikasi publik lebih kuat.

b. Kelemahan yang masih ditemukan dalam Diskominfo Kota Salatiga adalah:

- 1) Keterbatasan SDM. Terbatasnya jumlah pegawai di semua bidang dan sekretariat, serta kemampuan teknis sebagian SDM masih belum memadai.
- 2) Masih rendahnya tingkat kesadaran keamanan informasi perangkat daerah dari tingkat Pimpinan sampai dengan pelaksana.
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana. Kondisi gedung dinas dan kendaraan operasional belum layak, serta fasilitas TIK masih terbatas.
- 4) Indeks SPBE masih rendah (cukup). Hal ini menunjukkan implementasi pemerintahan berbasis elektronik belum optimal.
- 5) Kelemahan regulasi daerah. Belum lengkapnya kebijakan SPBE, Dataku, dan keterbukaan informasi public serta belum diterapkannya secara optimal terkait kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi SPBE.
- 6) Keterbatasan infrastruktur jaringan. Jaringan intra-pemerintah belum terbangun sehingga integrasi sistem masih lemah.
- 7) Kualitas aplikasi daerah belum standar. Masih banyak aplikasi hasil pengembangan yang tidak mengikuti standar RPL (Rekayasa Perangkat Lunak).
- 8) Keterbukaan informasi publik rendah. Hasil penilaian masih dalam kategori Tidak Informatif.
- 9) Integrasi data antar OPD belum optimal. Satu Data Salatiga masih lemah karena kurangnya komitmen dan respon OPD dalam updating data.

c. Tantangan utama yang akan dihadapi Diskominfo Kota Salatiga adalah:

- 1) Optimalisasi kebijakan daerah. Belum diterapkannya secara optimal beberapa kebijakan terkait dengan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian untuk keamanan informasi
-

yang telah ditetapkan.

- 2) Keterbatasan kapasitas SDM. Kebutuhan akan pegawai dengan kompetensi yang memadai dalam bidang TIK, statistik, dan persandian untuk keamanan informasi belum sebanding dengan ketersediaan di lingkungan dinas.
 - 3) Keterbatasan infrastruktur dan pembiayaan. Tuntutan pengembangan sarana, prasarana, dan infrastruktur penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian untuk keamanan informasi demi mendukung pelaksanaan *e-government* masih tinggi sementara dukungan anggaran relatif terbatas.
 - 4) Rendahnya kesadaran dan kepatuhan OPD. Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam mengelola data, keterbukaan informasi, dan keamanan informasi.
 - 5) Ancaman keamanan informasi. Meningkatnya risiko serangan siber, penyebaran hoaks, dan disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas informasi publik.
- d. Peluang utama yang terbuka bagi Diskominfo Kota Salatiga adalah:
- 1) Potensi SDM lokal. Banyaknya tenaga ahli dan lulusan bidang TIK di Kota Salatiga yang bisa didayagunakan.
 - 2) Regulasi nasional yang mendukung. Adanya kebijakan SPBE, keterbukaan informasi publik, dan Satu Data Indonesia sebagai kerangka hukum yang jelas.
 - 3) Dukungan infrastruktur pusat. Tersedianya Pusat Data Nasional dan aplikasi umum Kementerian Kominfo untuk berbagi pakai dengan pemerintah daerah.
 - 4) Beragam media informasi. Tersedianya berbagai media komunikasi publik (TV, radio, media online, media sosial) yang bisa digunakan untuk memperluas jangkauan diseminasi informasi.

2.3.1 Kelompok Sasaran Masyarakat

Kelompok sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika adalah pihak-pihak yang menjadi prioritas penerima manfaat dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan komunikasi, informatika, statistik sektoral, dan persandian. Penetapan kelompok sasaran ini didasarkan pada analisis

kebutuhan pelayanan publik, kondisi sosial ekonomi masyarakat, perkembangan teknologi informasi, serta tuntutan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Adapun kelompok sasaran Dinas Kominfo meliputi:

1. **Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah** sebagai pengguna dan pengelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, pengelolaan data sektoral, layanan persandian, dan keamanan informasi, guna mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengambilan kebijakan berbasis data.
2. **Masyarakat Umum**, termasuk kelompok rentan dan masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses informasi, sebagai penerima layanan informasi publik, komunikasi publik pemerintah, serta program peningkatan literasi dan inklusi digital.
3. **Pelaku Usaha dan Ekonomi Digital**, khususnya UMKM dan pelaku ekonomi kreatif berbasis digital, sebagai sasaran pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan daya saing ekonomi daerah.
4. **Lembaga Pendidikan dan Komunitas Literasi Digital**, sebagai mitra strategis dalam pengembangan sumber daya manusia, peningkatan literasi digital, serta inovasi pemanfaatan data dan teknologi informasi.
5. **Media Massa dan Pengelola Informasi Publik**, sebagai mitra dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah yang akurat, transparan, dan bertanggung jawab.
6. **Pimpinan Daerah dan Pemangku Kepentingan Pembangunan**, sebagai pengguna data sektoral, informasi statistik, dan sistem pendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

2.3.2 Mitra Perangkat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik sektoral, persandian, serta dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika menjalin kerja sama dengan berbagai mitra kerja dan stakeholder strategis. Mitra-mitra tersebut berperan penting dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan,

sasaran, serta program strategis pembangunan daerah. Adapun mitra kerja Dinas Kominfo meliputi:

1. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Seluruh OPD sebagai mitra utama dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengelolaan data sektoral, integrasi aplikasi, komunikasi publik pemerintah, serta penyediaan informasi pembangunan.

2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

- Kementerian Komunikasi dan Digital / Kominfo RI
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Badan Pusat Statistik (BPS)
- Dinas Kominfo Provinsi

Sebagai pembina, regulator, penyedia kebijakan nasional, standar teknis, serta pendukung sinergi program lintas pemerintahan.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sebagai mitra dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, khususnya terkait keterbukaan informasi publik dan pemanfaatan data pembangunan.

4. Media Massa dan Lembaga Penyiaran

Media cetak, elektronik, dan daring, termasuk lembaga penyiaran publik dan swasta, sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi pembangunan, kebijakan pemerintah, serta edukasi publik.

5. Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan

Sebagai mitra dalam pengembangan riset, inovasi teknologi informasi, peningkatan literasi digital, serta penyediaan data dan kajian pendukung perencanaan pembangunan.

6. Pelaku Usaha dan Penyedia Layanan TIK

Perusahaan telekomunikasi, penyedia jaringan, pengembang aplikasi, dan penyedia pusat data, sebagai mitra dalam penyediaan infrastruktur dan layanan teknologi informasi.

7. Komunitas, Organisasi Masyarakat, dan Relawan Digital

Termasuk komunitas literasi digital, pegiat keterbukaan informasi, dan organisasi kemasyarakatan, sebagai mitra dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan inklusi digital.

8. Lembaga Vertikal dan Instansi Terkait Lainnya

Termasuk aparat penegak hukum, lembaga pengawasan, dan instansi vertikal lainnya, khususnya dalam aspek keamanan informasi, persandian, dan perlindungan data.

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis

2.4.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan bidang statistik dan urusan bidang persandian. Untuk menentukan isu-isu strategis dimulai dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika.

Identifikasi permasalahan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator pada RPJMD yang lalu atau celah yang ada pada kondisi saat ini dengan kondisi ideal serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kominfo. Hal-hal di atas dapat dilihat sebagai berikut:

1. Aplikasi dan Informatika

Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi pemerintahan masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi antar-perangkat daerah. Pemanfaatan arsitektur SPBE sebagai acuan pengembangan sistem belum optimal, serta kualitas dan kapasitas infrastruktur TIK belum sepenuhnya mendukung layanan digital yang handal dan berkelanjutan.

2. Informasi dan Komunikasi Publik

Pengelolaan informasi publik dan komunikasi pemerintah belum sepenuhnya terkoordinasi lintas perangkat daerah. Penyampaian informasi masih bersifat sektoral, belum konsisten, dan belum optimal memanfaatkan media digital secara strategis. Di sisi lain, arus disinformasi dan hoaks masih menjadi tantangan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

3. Statistik dan Persandian

Kualitas, konsistensi, dan keterpaduan data sektoral antar-perangkat daerah belum sepenuhnya optimal. Penerapan standar data, metadata, serta peran walidata dan produsen data belum berjalan maksimal. Selain itu, penerapan sistem keamanan informasi dan persandian belum merata di seluruh OPD.

2.4.2. Isu Strategis

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu strategis Dinas Kominfo yaitu **“Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**.

Tabel 2.4 Tantangan, Peluang, Kelemahan dan Kekuatan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

RENSTRA KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		RENCANA STRATEGIS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH		HASIL ANALISIS UNTUK RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SALATIGA	
TANTANGAN	PELUANG	TANTANGAN	PELUANG	TANTANGAN	PELUANG
- Peningkatan pertumbuhan data dan penggunaan data - Pemerataan serta pemeliharaan infrastruktur dan cakupan layanan - Interkoneksi antara jaringan Palapa Ring dengan jaringan existing operator telekomunikasi - Penyelenggaraan literasi digital bagi masyarakat dan pengelolaan hoax	- Maraknya kebijakan pemerintah dalam penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan publik dan isu tata kelola data serta komitmen pemerintah untuk tergabung dalam inisiatif-inisiatif global seperti Open Government Indonesia (OGI), Sustainable Development Goals (SDGs) dan Extractive Industries Transparency Initiative (IETI) - Perkembangan teknologi 5G dan Internet of Things (IoT)	- Percepatan penyediaan SDM serta sarana prasarana dan infrastruktur untuk mengantisipasi cepatnya perkembangan teknologi informasi - Pemerataan pelayanan jasa telekomunikasi di daerah untuk membuka akses dan kelancaran komunikasi serta pertumbuhan perekonomian pedesaan	- Adanya dukungan kebijakan dan dana dari Pemerintah Pusat - Semakin berkembangnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang membuka akses informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan pembangunan - Semakin tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan komunikasi dan informatika	- Penyediaan jaringan intra pemerintah Kota Salatiga - Penyediaan sarana dan prasarana pengamanan informasi daerah - Penyediaan SDM yang kompeten dalam statistik sektoral dan pengamanan informasi daerah - Integrasi database dan layanan SPBE serta optimalisasi aplikasi umum - Peningkatan kesadaran dan kompetensi ASN tentang penggunaan data/informasi dalam pembangunan daerah serta tentang keamanan informasi daerah - Penerapan dan penyempurnaan kebijakan daerah terkait pengamanan informasi daerah - Kesenjangan informasi sehingga warga belum mendapatkan informasi yang berimbang tentang pembangunan Kota Salatiga.	- Banyaknya SDM teknologi informasi dan komunikasi di Kota Salatiga - Dukungan infrastruktur pusat. Tersedianya Pusat Data Nasional dan aplikasi umum Kementerian Kominfo untuk berbagi pakai dengan pemerintah daerah - Adanya dukungan berbagai regulasi pusat (Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan BSSN nomor 10 Tahun 2019, serta Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021) - Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga yang telah dituangkan pada Bab II, serta tugas pokok fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tahun 2025-2029, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

3.1 Tujuan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta mendorong transformasi digital menuju Kota Salatiga yang cerdas dan berdaya saing dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel melalui penerapan Sistem Pemerintahan Digital serta meningkatkan kualitas pelayanan publik prima melalui inovasi digital dan keterbukaan informasi. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, proses pelayanan publik maka sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga yang melakukan pelayanan komunikasi dan informatika, tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga yang dirumuskan dalam Renstra Tahun 2025- 2029 adalah **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital”**.

3.2 Sasaran

Sasaran dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dengan penerapan e government”

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2025-2029 beserta dengan target kinerja selama 5 (lima) tahun akan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika											
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Digital	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dan berintegritas tinggi menuju pelayanan publik prima		Indeks PEMDI (Angka)	0	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Di Dukung Dengan Penerapan E-Government	Indeks Kematangan Pembangunan Statistik (Angka)	2,61	2,62	2,63	2,64	2,65	2,66	2,67	
			Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Angka)	100	90,5	90,75	91	91,25	91,5	91,75	

3.3 Strategi

Strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dalam pelayanan, penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penerapan.
- b. Pemanfaatan teknologi informasi yang didukung dengan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- c. Penerapan Sistem manajemen Keamanan Informasi secara masif sehingga semakin optimal yang didasari dengan peningkatan kesadaran keamanan informasi serta peningkatan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang keamanan informasi.
- d. Penyediaan data dan informasi di website PPID dan media sosial pemerintah Kota Salatiga sesuai dengan Perki 1 (peraturan komisi informasi) tahun 2021 tentang standar pelayanan informasi publik.

3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang diambil dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. 1) Peningkatan akses informasi publik dan penumbuhan inovasi layanan; 2) Menyediakan layanan informasi publik dengan kapasitas sumber daya komunikasi publik.
 - b. 1) Peningkatan kualitas jaringan, perangkat lunak dan infrastruktur pendukung teknologi; 2) Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah; 3) Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi, informasi dan komunikasi; 4) Penerapan sistem e-government yang terintegrasi dan layanan publik berbasis digital.
 - c. 1) Penyediaan layanan keamanan informasi kepada Perangkat Daerah; 2) Peningkatan keamanan informasi yang berbasis elektronik dan non elektronik melalui penerapan SMKI SPBE secara optimal; 3) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM di bidang keamanan informasi; 4) Peningkatan literasi dan edukasi keamanan informasi.
 - d. memperbaharui peraturan walikota nomor 33 tahun 2018 tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan pemerintah kota salatiga yang disesuaikan dengan perki 1 tahun 2021.
-

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra	Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dan berintegritas tinggi menuju pelayanan publik prima	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis digital dan berintegrasi tinggi menuju pelayanan publik prima	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dengan penerapan e government	Indeks Pemerintahan Digital	Nilai		1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
			Indeks Kematangan Pembangunan Statistik	Nilai	2,61	2,61	2,63	2,63	2,64	2,64	2,65
			Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	100	90,5	90,75	91	91,25	91,5	91,75

3.5 Pentahapan Pembangunan Penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika.

- a. Bidang urusan komunikasi dan informatika.
- b. Bidang statistik.
- c. Bidang persandian.

Pentahapan dalam penyelenggaraan urusan persandian adalah sebagai berikut:

1) Tahap 1 (2025). Konsolidasi dan Penguatan Dasar.

Tahap pertama pembangunan keamanan informasi pada tahun 2025 berfokus pada konsolidasi kelembagaan, penataan regulasi, dan pembentukan baseline tata kelola keamanan informasi. Tahun ini menjadi fondasi awal yang akan menentukan arah pembangunan keamanan informasi daerah hingga akhir periode Renstra 2025–2029. Langkah awal yang dilakukan adalah penguatan kelembagaan keamanan informasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 9 tahun 2023 tentang Sistem manajemen Keamanan Informasi SPBE juga Tim Tanggap Insiden Siber (Salatiga-CSIRT) yang sudah terbentuk.

Penguatan ini mencakup penyusunan dan penerapan SOP penanganan insiden keamanan siber, mekanisme pelaporan, dan alur eskalasi koordinasi dengan BSSN maupun tim CSIRT di tingkat regional/nasional. Dengan SOP yang jelas, CSIRT dapat berfungsi lebih optimal sebagai pusat respons dan mitigasi insiden siber pemerintah daerah. Dari sisi kebijakan dan regulasi, dilakukan reviu dan penyempurnaan terhadap Perwali Nomor 9 Tahun 2023 tentang SMKI SPBE. Reviu ini bertujuan menyesuaikan dengan hasil penilaian Indeks KAMI 2024 dan LHE SPBE 2024.

Selain itu, Diskominfo menyusun dokumen roadmap keamanan informasi 2025–2029 yang memuat arah kebijakan, strategi, serta sasaran kinerja lima tahun ke depan. Roadmap ini akan menjadi panduan resmi dalam implementasi program keamanan informasi lintas OPD. Selanjutnya, dilakukan pemetaan aset informasi dan baseline manajemen risiko di seluruh OPD. Kegiatan ini meliputi inventarisasi data, sistem aplikasi, jaringan, serta perangkat TIK yang dimiliki masing-masing OPD, termasuk klasifikasi data berdasarkan tingkat sensitivitasnya (rahasia, terbatas, atau publik).

Dengan pemetaan ini, pemerintah daerah memiliki dasar untuk melakukan manajemen risiko keamanan informasi yang lebih terarah dan proporsional. Aspek sumber daya manusia juga diperhatikan sejak awal. Tahun 2025 difokuskan pada peningkatan kesadaran keamanan informasi (security awareness) melalui sosialisasi, workshop, dan kampanye literasi digital yang ditujukan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga. Tujuannya adalah menumbuhkan budaya kerja yang aman secara digital, mengingat faktor manusia sering

menjadi titik lemah dalam keamanan informasi. Dari sisi teknologi, Diskominfo mulai membangun dasar infrastruktur monitoring keamanan informasi dengan merancang konsep dashboard monitoring terpusat yang nantinya terintegrasi dengan firewall, sistem jaringan, dan aplikasi layanan publik. Pada tahap ini fokusnya masih pada desain dan uji coba awal, untuk kemudian dioperasionalkan secara penuh di tahap berikutnya.

Selain itu, penilaian mandiri Indeks KAMI dan evaluasi SPBE tahunan tetap dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kondisi awal, sekaligus sebagai bahan monitoring tahapan perbaikan di tahun-tahun selanjutnya. Target di tahap ini adalah memastikan baseline yang kuat agar semua kegiatan penguatan di tahun berikutnya memiliki pijakan yang jelas. Dengan demikian, tahun 2025 merupakan fase konsolidasi dan penguatan dasar, di mana kegiatan difokuskan pada penguatan kelembagaan CSIRT, penataan kebijakan, pemetaan aset dan risiko, peningkatan kesadaran ASN, serta pembangunan fondasi infrastruktur monitoring. Tahap ini menjadi pijakan penting agar pelaksanaan penguatan kapasitas dan sistem di tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Konsolidasi dan penguatan dasar kelembagaan keamanan informasi.

2) Tahap 2 (2026). Penguatan kapasitas dan sistem.

Memasuki tahun 2026, fokus utama pembangunan keamanan informasi di Kota Salatiga diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, penguatan sistem pengamanan teknis, serta penerapan manajemen risiko yang lebih menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola keamanan informasi yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Perwali SMKI SPBE Nomor 9 Tahun 2023 serta memperkuat kinerja Salatiga-CSIRT yang sudah terbentuk.

Pertama, pada aspek manajemen risiko dan pengendalian keamanan informasi, Diskominfo bersama OPD melakukan implementasi kontrol keamanan prioritas berdasarkan hasil penilaian Indeks KAMI 2024. Fokus utamanya adalah pada penguatan kontrol akses, perlindungan data sensitif, pengelolaan aset informasi, serta penggunaan kriptografi untuk menjamin kerahasiaan dan integritas data. Penerapan manajemen risiko berbasis ISO/IEC 27005 mulai dioperasionalkan agar setiap OPD memiliki daftar risiko, mitigasi, dan mekanisme tindak lanjut yang terdokumentasi dengan baik.

Kedua, dari sisi sistem dan teknologi pengamanan, dilakukan peningkatan kapasitas infrastruktur jaringan pemerintah daerah. Firewall yang sudah berjalan diperkuat dengan sistem Intrusion Detection and Prevention System (IDS/IPS) serta perangkat pengamanan generasi baru (Next-Generation Firewall). Sistem monitoring juga mulai

diintegrasikan secara terpusat untuk mendukung kinerja CSIRT. Langkah ini bertujuan untuk mendeteksi, mencegah, dan merespons ancaman siber dengan lebih cepat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pemantauan manual.

Ketiga, dalam hal layanan tanda tangan elektronik (TTE), implementasi diperluas secara bertahap ke seluruh OPD agar semua dokumen kedinasan memiliki validitas hukum dan keamanan digital yang lebih terjamin. Penerapan TTE juga mendukung efektivitas pelayanan publik berbasis elektronik serta meningkatkan integritas data dalam sistem SPBE. Selain itu, rencana kesinambungan layanan (Business Continuity Plan/BCP dan Disaster Recovery Plan/DRP) mulai diuji coba untuk sistem dan aplikasi prioritas daerah, seperti portal SPBE, Satu Data, dan layanan publik strategis lainnya. Uji coba ini penting agar pemerintah daerah memiliki kemampuan pulih cepat apabila terjadi serangan siber, kegagalan sistem, atau bencana yang mengganggu layanan elektronik.

Aspek kapasitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas pada tahun 2026. ASN di lingkungan Diskominfo maupun pengelola TIK di OPD akan mendapat pelatihan teknis mengenai pengamanan sistem, pengelolaan insiden, serta tata kelola data dan informasi sesuai dengan standar BSSN. Selain pelatihan teknis, program peningkatan kesadaran keamanan informasi (security awareness program) dilakukan secara rutin untuk semua pegawai pemerintah daerah, agar setiap ASN memahami perannya dalam menjaga keamanan data dan informasi.

Terakhir, tahun 2026 menjadi momentum penting untuk meningkatkan nilai Indeks KAMI dan Indeks SPBE Kota Salatiga. Evaluasi tahunan dilakukan untuk memastikan adanya peningkatan kualitas tata kelola keamanan informasi, dengan target kenaikan skor Indeks KAMI menuju kategori “Terdefinisi” (Level III) dan Indeks SPBE naik minimal 0,2–0,3 poin dari capaian tahun 2024.

Dengan demikian, tahap 2026 berfokus pada penguatan pondasi operasional keamanan informasi melalui kombinasi kebijakan, teknologi, SDM, dan monitoring yang lebih canggih. Tahun ini menjadi fase krusial yang menjembatani tahapan konsolidasi (2025) menuju implementasi standar internasional (2027).

3) Tahap 3 (2027). Implementasi Lanjutan dan Standarisasi.

Pada tahun 2027, pembangunan keamanan informasi di Kota Salatiga diarahkan untuk memasuki tahap implementasi lanjutan dan standarisasi. Setelah melalui fase konsolidasi (2025) dan penguatan sistem (2026), pada tahap ini fokus utama adalah memastikan seluruh kebijakan, sistem, dan mekanisme keamanan informasi yang sudah disiapkan dapat diterapkan secara luas dengan mengacu pada standar nasional maupun internasional.

Langkah pertama adalah penerapan standar keamanan informasi berbasis ISO/IEC 27001 dan kerangka kerja SPBE Security. Implementasi standar ini dilakukan pada sistem dan layanan prioritas, seperti aplikasi SPBE, portal pelayanan publik, serta pusat data daerah. Diskominfo memulai proses penyusunan Information Security Management System (ISMS) formal dengan lingkup terbatas sebagai pilot project. Dengan adanya standar ini, mekanisme keamanan informasi dapat lebih terdokumentasi, terukur, dan dapat diaudit secara berkala.

Selain itu, audit internal keamanan informasi mulai dilaksanakan secara rutin setiap semester. Audit ini bertujuan menilai tingkat kepatuhan OPD terhadap kebijakan SMKI, efektivitas kontrol keamanan yang sudah diterapkan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Audit juga menjadi sarana identifikasi kelemahan agar segera dilakukan perbaikan sebelum terjadi insiden serius.

Dari sisi operasional, Diskominfo mengembangkan Security Operation Center (SOC) mini. SOC ini dibangun dengan memanfaatkan integrasi log dari firewall, IDS/IPS, server, dan aplikasi utama sehingga memungkinkan monitoring keamanan dilakukan secara lebih proaktif. SOC mini menjadi “mata” pemerintah daerah dalam mendeteksi aktivitas anomali, serangan siber, atau potensi kebocoran data secara real-time.

Pada tahap ini, fungsi Salatiga-CSIRT diperluas tidak hanya untuk menangani insiden, tetapi juga untuk melakukan threat hunting, analisis forensik digital, serta koordinasi penanganan ancaman bersama BSSN maupun CSIRT regional/nasional. Kapabilitas ini menjadikan CSIRT lebih matang dalam mengantisipasi potensi serangan siber yang semakin kompleks. Dari aspek teknologi, 2027 juga ditandai dengan penerapan sistem perlindungan data tingkat lanjut, seperti Data Loss Prevention (DLP) dan Endpoint Detection & Response (EDR/XDR), untuk meminimalisasi risiko kebocoran data maupun serangan berbasis perangkat pengguna. Penerapan teknologi ini penting mengingat meningkatnya penggunaan perangkat mobile dan layanan cloud dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah.

Selanjutnya, implementasi tanda tangan elektronik (TTE) ditargetkan sudah digunakan oleh mayoritas OPD (minimal 75%), sehingga semua dokumen kedinasan yang bersifat resmi dapat diproses secara digital dengan keamanan yang terjamin. Hal ini tidak hanya memperkuat aspek keamanan, tetapi juga mendukung efektivitas pelayanan publik berbasis SPBE. Sebagai alat ukur capaian, tahun 2027 ditargetkan hasil evaluasi Indeks KAMI Kota Salatiga meningkat ke Level III+ (Terdefinisi dan Selaras), yang menunjukkan bahwa tata kelola keamanan informasi sudah mulai berjalan sesuai standar yang berlaku dan terintegrasi

dengan praktik terbaik nasional. Hasil ini juga menjadi validasi atas efektivitas kebijakan, infrastruktur, dan peran CSIRT dalam menjaga ekosistem digital pemerintah daerah.

Dengan demikian, tahun 2027 merupakan fase implementasi lanjutan dan standardisasi, di mana fokus diarahkan pada penerapan standar keamanan informasi (ISO 27001/SPBE Security), audit rutin, pembangunan SOC mini, peningkatan fungsi CSIRT, serta perluasan penerapan TTE. Tahap ini menjadi kunci untuk memastikan sistem keamanan informasi Kota Salatiga tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga memenuhi standar formal yang diakui secara nasional maupun internasional.

4) Tahap 4 (2028). Optimalisasi dan Integrasi.

Memasuki tahun 2028, pembangunan keamanan informasi Kota Salatiga berfokus pada optimalisasi sistem yang sudah diterapkan dan integrasi keamanan informasi ke seluruh layanan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan smart city. Tahap ini menjadi momentum penting untuk memastikan keamanan informasi bukan hanya berjalan sebagai fungsi teknis, tetapi sudah menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan daerah.

Langkah utama adalah sertifikasi eksternal ISO/IEC 27001 untuk sistem prioritas daerah, seperti pusat data, portal SPBE, dan aplikasi layanan publik strategis (misalnya Dataku, e-office, dan layanan perizinan online). Sertifikasi ini menjadi bukti formal bahwa tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah telah sesuai dengan standar internasional dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara nasional maupun global.

Dari sisi manajemen, Diskominfo bersama OPD melakukan penguatan mekanisme audit TIK dan evaluasi keamanan informasi lintas perangkat daerah. Audit dilakukan tidak hanya secara internal, tetapi juga dengan melibatkan pihak eksternal (BSSN atau auditor independen), sehingga hasil evaluasi lebih objektif dan dapat digunakan sebagai bahan peningkatan tata kelola secara berkelanjutan.

Pada aspek operasional, tahun 2028 ditandai dengan integrasi penuh keamanan informasi dengan layanan SPBE dan smart city. Hal ini mencakup penerapan arsitektur Zero Trust Security untuk mengamankan akses aplikasi, data, dan jaringan. Setiap pengguna maupun perangkat yang mengakses sistem pemerintah wajib diverifikasi dan divalidasi secara ketat, sehingga risiko penyalahgunaan akun atau akses ilegal dapat diminimalkan.

Selain itu, dilakukan latihan keamanan siber (cyber drill dan tabletop exercise) secara rutin yang melibatkan Diskominfo, OPD, BSSN, aparat

penegak hukum, serta mitra penyedia layanan cloud atau pusat data. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan semua pihak dalam menghadapi skenario ancaman nyata, sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penanganan insiden siber.

Pengembangan SOC mini yang mulai berjalan pada 2027 ditingkatkan kapabilitasnya menjadi SOC daerah dengan cakupan lebih luas, mampu memantau aktivitas keamanan dari berbagai aplikasi dan jaringan OPD secara real time. SOC daerah juga dilengkapi dengan analitik berbasis AI untuk mendeteksi pola serangan dan anomali lebih cepat, sehingga respon insiden dapat dilakukan lebih proaktif.

Aspek sumber daya manusia tetap menjadi perhatian utama. Tahun 2028 diarahkan pada peningkatan kapasitas teknis lanjutan bagi pengelola TIK OPD melalui pelatihan spesialisasi (forensik digital, penetration testing, threat intelligence). Di sisi lain, kampanye kesadaran keamanan informasi untuk ASN dan masyarakat umum diperkuat, sehingga ekosistem keamanan siber tidak hanya dibangun secara teknis, tetapi juga melalui budaya kerja dan perilaku digital yang aman.

Dari sisi capaian kinerja, tahun 2028 ditargetkan Indeks KAMI Kota Salatiga meningkat ke Level IV (Dikelola dan Terhitung), yang berarti tata kelola keamanan informasi sudah matang, terukur, dan mampu menunjukkan efektivitas pengendalian keamanan dalam mendukung SPBE. Indeks SPBE juga ditargetkan meningkat ke kategori “Sangat Baik” dengan nilai >4,3, seiring dengan integrasi penuh keamanan informasi ke dalam layanan digital pemerintah.

Dengan demikian, tahun 2028 menjadi tahap optimalisasi dan integrasi, di mana fokus diarahkan pada sertifikasi ISO 27001, penguatan audit dan evaluasi, integrasi penuh keamanan dengan SPBE dan smart city, penerapan Zero Trust Security, serta penguatan SOC daerah. Tahap ini memastikan keamanan informasi benar-benar melekat dalam setiap proses digitalisasi pemerintahan Kota Salatiga, sekaligus mempersiapkan konsolidasi capaian akhir pada tahun 2029.

5) Tahap 5 (2029). Konsolidasi dan Keberlanjutan.

Tahun 2029 merupakan tahap akhir dari pelaksanaan Renstra 2025–2029 sekaligus fase konsolidasi dan keberlanjutan pembangunan keamanan informasi di Kota Salatiga. Fokus utama pada tahap ini adalah memastikan seluruh inisiatif yang telah dijalankan mencapai tingkat kematangan optimal, terdokumentasi sebagai best practice, serta berlanjut dalam periode perencanaan berikutnya (2030–2034).

Langkah pertama adalah evaluasi menyeluruh tata kelola keamanan informasi. Diskominfo bersama BSSN dan Inspektorat melakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh aspek tata kelola, mulai dari

kebijakan, manajemen risiko, manajemen aset, pengendalian teknis, hingga kapasitas sumber daya manusia. Evaluasi ini dilaksanakan dalam bentuk audit keamanan informasi tahunan yang lebih menyeluruh, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan strategis jangka panjang. Dari sisi standar, tahun 2029 ditargetkan seluruh sistem SPBE kritikal di Kota Salatiga telah tersertifikasi ISO/IEC 27001, tidak hanya sistem prioritas tertentu. Hal ini menjadi bukti bahwa tata kelola keamanan informasi daerah telah memenuhi standar internasional, serta memberikan kepercayaan lebih tinggi kepada masyarakat terhadap keamanan layanan digital pemerintah.

Dalam aspek kelembagaan dan operasional, SOC Daerah (Security Operation Center) yang mulai dikembangkan sejak 2027–2028 ditargetkan sudah beroperasi penuh dengan kapabilitas monitoring real-time, analisis ancaman berbasis AI, dan integrasi dengan CSIRT nasional. SOC Daerah ini menjadi pusat kendali utama dalam menjaga keamanan ekosistem digital Kota Salatiga, sekaligus berfungsi sebagai model kerja sama multipihak dengan melibatkan perguruan tinggi, komunitas IT lokal, dan sektor swasta.

Selain itu, Salatiga-CSIRT diposisikan sebagai pusat unggulan daerah dalam penanganan insiden siber, dengan kapabilitas penuh dalam threat intelligence sharing, digital forensic, hingga koordinasi pemulihan layanan secara cepat. Targetnya adalah menurunkan Mean Time to Respond (MTTR) insiden menjadi kurang dari 12 jam, serta menjadikan CSIRT sebagai contoh implementasi tanggap insiden siber di tingkat daerah.

Aspek pengembangan SDM dan masyarakat juga tetap dijaga keberlanjutannya. Tahun 2029 diarahkan pada inovasi literasi keamanan informasi untuk masyarakat luas, misalnya melalui penyediaan dashboard publik keamanan digital, kampanye literasi perlindungan data pribadi, serta program edukasi keamanan siber di sekolah-sekolah dan komunitas digital. Dengan demikian, budaya keamanan informasi tidak hanya terbatas di lingkungan pemerintah, tetapi juga meluas ke seluruh ekosistem masyarakat Kota Salatiga.

Dari sisi capaian kinerja, target tahun 2029 adalah Indeks KAMI Kota Salatiga mencapai Level IV (Dikelola dan Terhitung), yang berarti keamanan informasi tidak hanya diatur secara kebijakan, tetapi juga terukur dalam hasilnya. Sementara itu, Indeks SPBE ditargetkan mencapai nilai $\geq 4,5$ (kategori Sangat Baik), menandakan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik Kota Salatiga telah berjalan dengan integrasi penuh dan berlandaskan keamanan informasi yang kuat.

Sebagai penutup, tahun 2029 juga difokuskan pada penyusunan roadmap keamanan informasi 2030–2034, yang akan menekankan pada

isu-isu keamanan baru seperti AI security, cloud security, dan perlindungan data pribadi. Penyusunan roadmap ini penting agar keberlanjutan program keamanan informasi tetap terjaga, sekaligus mengantisipasi tantangan teknologi yang semakin kompleks di masa depan.

Dengan demikian, tahun 2029 merupakan fase konsolidasi dan keberlanjutan, di mana seluruh pencapaian dikonsolidasikan, standar internasional diimplementasikan penuh, SOC daerah beroperasi optimal, dan literasi keamanan informasi meluas ke masyarakat. Tahun ini juga menjadi penentu keberhasilan pencapaian target Renstra 2025–2029 sekaligus pijakan strategis untuk agenda pembangunan keamanan informasi periode berikutnya.



BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
 - 1) Kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah.
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah.
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - e) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - f) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu.
 - g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
 - b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - c) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - d) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.



- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel.
 - d) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - e) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - f) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - g) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - a) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
 - b) Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik.
 - c) Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik.
 - d) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
 - e) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik.
 - f) Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media.
 - g) Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan.
 - h) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.
 - i) Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Program Aplikasi dan Informatika.
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - a) Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
-

- c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
 - 2) Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - a) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - c) Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah.
 - d) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah.
 - e) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
 - g) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.
 - h) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE.
 - d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.
 - b) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi.
 - c) Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral.
 - d) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral.
 - e) Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur.
 - f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah.
 - e. Program Penyelenggaran Persandian untuk Pengamanan Informasi.
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - a) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
-

- d) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.
 - e) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- a) Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Secara lebih rinci terkait dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada table 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Program, Indikator dan Formulasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Program	Indikator Program	Formulasi
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Prosentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Jumlah masyarakat sasaran yang mengetahui kebijakan dan program prioritas / Jumlah total masyarakat sasaran penyebaran informasi publik x 100%
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yg terhubung dengan akses internet Kominfo / Jumlah total OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet Kominfo x 100%
	Prosentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah pelayanan publik yg diselenggarakan secara online dan terintegrasi / Jumlah seluruh Pelayanan publik x 100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	Jumlah OPD yg menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah / Jumlah seluruh OPD x 100%
	Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	Jumlah OPD yg menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah / Jumlah seluruh OPD x 100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi (%)	Nilai tingkat kematangan keamanan informasi maksimum / Nilai tingkat kematangan keamanan informasi daerah yang dicapai x 100%

Tabel 4.2 Sasaran, Outcome , Output dan Indikator Program



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Digital	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dan berintegritas tinggi menuju pelayanan publik prima						
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya koordinasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Meningkatnya pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah			Prosentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Relasi Media	
				Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Pelayanan Informasi Publik	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
				Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
				Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Penyusunan Konten	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Terlaksananya Pengelolaan Domain dan Sub Domain Kota Salatiga			
				Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
				Terlaksananya pengelolaan E-Gov di Kota Slatiga			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
				Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Penyediaan Akses Internet	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Salatiga		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
				Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Prosentase Orgnasisasi perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
				Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	umlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma,	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian		

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2025-2029 sebagai berikut:



TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TH 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				12.061.274.002 ,00		18.988.455.056 ,00		11.811.344.23 9,00		12.252.309.330 ,00		12.516.271. 384,00				
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.417.187.674, 00		15.722.189.752 ,00		8.344.589.010 ,00		8.711.161.565, 00		8.957.780.9 03,00				
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100	100	8.417.187.674, 00	100	15.722.189.752 ,00	100	8.344.589.010 ,00	100	8.711.161.565, 00	100	8.957.780.9 03,00	2.16.2.20.2. 21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	82	88,31				89,02				89,64				90,09	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75,15	75,25				75,30				75,35				75,40	
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,0 0				
Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi capaian kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,0 0				
2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,0 0				
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,0 0				
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.465.187.674, 00		7.837.247.058, 00		7.433.822.010 ,00		7.715.395.247, 00		7.907.986.4 75,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TH 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terbayarnya gaji dan tunjangan bagi PNS serta pengelola keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43	41	7.465.187.674,00	42	7.837.247.058,00	42	7.433.822.010,00	42	7.715.395.247,00	42	7.907.986.475,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.441.187.674,00		7.813.247.058,00		7.409.822.010,00		7.691.395.247,00		7.883.986.475,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43	41	7.441.187.674,00	42	7.813.247.058,00	42	7.409.822.010,00	42	7.691.395.247,00	42	7.883.986.475,00		
2.16.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	24.000.000,00	1	24.000.000,00	1	24.000.000,00	1	24.000.000,00	1	24.000.000,00		
2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
persentase barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.16.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Cakupan administrasi kepegawaian pernakgat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00		
2.16.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00		
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				196.000.000,00		205.800.000,00		166.000.000,00		174.674.959,00		192.854.500,00		
Cakupan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	196.000.000,00	1	205.800.000,00	1	166.000.000,00	1	174.674.959,00	1	192.854.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TH 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1				1		1			
2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000,00		6.300.000,00		6.000.000,00		6.150.000,00		6.334.500,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	6.000.000,00	1	6.300.000,00	1	6.000.000,00	1	6.150.000,00	1	6.334.500,00		
2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000,00		21.000.000,00		18.000.000,00		18.900.000,00		19.467.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	20.000.000,00	1	21.000.000,00	1	18.000.000,00	1	18.900.000,00	1	19.467.000,00		
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000,00		52.500.000,00		45.000.000,00		47.250.000,00		48.667.500,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000,00	1	52.500.000,00	1	45.000.000,00	1	47.250.000,00	1	48.667.500,00		
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.000.000,00		8.400.000,00		7.000.000,00		7.350.000,00		7.570.500,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	8.000.000,00	1	8.400.000,00	1	7.000.000,00	1	7.350.000,00	1	7.570.500,00		
2.16.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				12.000.000,00		12.600.000,00		10.000.000,00		10.500.000,00		10.815.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	12.000.000,00	1	12.600.000,00	1	10.000.000,00	1	10.500.000,00	1	10.815.000,00		
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat				100.000.000,00		105.000.000,00		80.000.000,00		84.524.959,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TH 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00		80.000.000,00	1	84.524.959,00	1	100.000.000,00		
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
terwujudnya ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional dan program pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0					
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0					
2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.16.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				496.000.000,00		505.920.000,00		509.767.000,00		535.255.350,00		559.792.118,00		
Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	496.000.000,00	1	505.920.000,00	1	509.767.000,00	1	535.255.350,00	1	559.792.118,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TH 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000,00		1.020.000,00		1.000.000,00		1.050.000,00		1.081.500,0 0		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.000.000,00	1	1.020.000,00	1	1.000.000,00	1	1.050.000,00	1	1.081.500,0 0		
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				105.000.000,00		107.100.000,00		105.000.000,0 0		110.250.000,00		113.557.500 ,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	105.000.000,00	1	107.100.000,00	1	105.000.000,0 0	1	110.250.000,00	1	113.557.500 ,00		
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				390.000.000,00		397.800.000,00		403.767.000,0 0		423.955.350,00		445.153.118 ,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	390.000.000,00	1	397.800.000,00	1	403.767.000,0 0	1	423.955.350,00	1	445.153.118 ,00		
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				255.000.000,00		7.168.222.694, 00		230.000.000,0 0		280.836.009,00		292.147.810 ,00		
Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	20	255.000.000,00	20	7.168.222.694, 00	20	230.000.000,0 0	20	280.836.009,00	20	292.147.810 ,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4		4		4		4		4			
2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				10.000.000,00		10.500.000,00		10.000.000,00		10.500.000,00		10.815.000, 00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	20	20	10.000.000,00	20	10.500.000,00	20	10.000.000,00	20	10.500.000,00	20	10.815.000, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TH 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	dibayarkan Pajaknya (Unit)													
2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000,00		105.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		108.150.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	6	100.000.000,00	6	105.000.000,00	6	100.000.000,00	6	105.000.000,00	6	108.150.000,00		
2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000,00		26.250.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		21.630.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20	25.000.000,00	20	26.250.000,00	20	20.000.000,00	20	21.000.000,00	20	21.630.000,00		
2.16.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				120.000.000,00		7.026.472.694,00		100.000.000,00		144.336.009,00		151.552.810,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	120.000.000,00	4	7.026.472.694,00	4	100.000.000,00	4	144.336.009,00	4	151.552.810,00		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				505.687.017,00		453.257.089,00		481.078.919,00		491.402.313,00		493.808.948,00		
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	100	100	505.687.017,00	100	453.257.089,00	100	481.078.919,00	100	491.402.313,00	100	493.808.948,00	2.16.2.20.2. 21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				505.687.017,00		453.257.089,00		481.078.919,00		491.402.313,00		493.808.948,00		
Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	4	4	505.687.017,00	4	453.257.089,00	4	481.078.919,00	4	491.402.313,00	4	493.808.948,00		
	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan	0	100				100				100			100

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TH 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	komunikasi publik (Persentase)													
	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	4	4		4		4		4					
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	5	5		5		5		5					
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	5	5		5		5		5					
2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media				100.000.000,00		98.245.089,00		103.428.919,00		106.094.313,00		106.409.663,00		
Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	98.245.089,00	1	103.428.919,00	1	106.094.313,00	1	106.409.663,00		
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				57.195.600,00		60.155.380,00		63.000.000,00		66.150.000,00		69.457.500,00		
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	4	4	57.195.600,00	4	60.155.380,00	4	63.000.000,00	4	66.150.000,00	4	69.457.500,00		
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik				142.661.417,00		100.099.120,00		109.150.000,00		106.848.000,00		100.553.355,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TH 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	5	5	142.661.417,00	5	100.099.120,00	5	109.150.000,00	5	106.848.000,00	5	100.553.355,00		
2.16.02.2.01.0018 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	0	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00		
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				125.000.000,00		110.000.000,00		115.500.000,00		117.810.000,00		118.163.430,00		
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	5	5	125.000.000,00	5	110.000.000,00	5	115.500.000,00	5	117.810.000,00	5	118.163.430,00		
2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten				80.830.000,00		84.757.500,00		90.000.000,00		94.500.000,00		99.225.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	4	4	80.830.000,00	4	84.757.500,00	4	90.000.000,00	4	94.500.000,00	4	99.225.000,00		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				3.138.399.311,00		2.813.008.215,00		2.985.676.310,00		3.049.745.452,00		3.064.681.533,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100	100	3.138.399.311,00	100	2.813.008.215,00	100	2.985.676.310,00	100	3.049.745.452,00	100	3.064.681.533,00	2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	60,05	65		70		75		80		85			
2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5.500.000,00		5.665.000,00		5.900.000,00		6.100.000,00		6.300.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Domain dan Sub Domain Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	1	1	5.500.000,00	1	5.665.000,00	1	5.900.000,00	1	6.100.000,00	1	6.300.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TH 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa				5.500.000,00		5.665.000,00		5.900.000,00		6.100.000,00		6.300.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	1	1	5.500.000,00	1	5.665.000,00	1	5.900.000,00	1	6.100.000,00	1	6.300.000,00		
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3.132.899.311,00		2.807.343.215,00		2.979.776.310,00		3.043.645.452,00		3.058.381.533,00		
Terlaksananya pengelolaan E- Gov di Kota Slatiga	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	30	30	3.132.899.311,00	30	2.807.343.215,00	30	2.979.776.310,00	30	3.043.645.452,00	30	3.058.381.533,00		
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	30	30		30		30		30					
2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional				3.600.000,00		3.700.000,00		3.775.000,00		3.850.500,00		3.925.000,00		
Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	1	1	3.600.000,00	1	3.700.000,00	1	3.775.000,00	1	3.850.500,00	1	3.925.000,00		
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				63.500.000,00		65.000.000,00		66.300.000,00		67.626.000,00		68.978.520,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TH 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	30	30	63.500.000,00	30	65.000.000,00	30	66.300.000,00	30	67.626.000,00	30	68.978.520,00		
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				147.000.000,00		150.000.000,00		153.000.000,00		156.060.000,00		159.181.200,00		
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	1	1	147.000.000,00	1	150.000.000,00	1	153.000.000,00	1	156.060.000,00	1	159.181.200,00		
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet				2.918.799.311,00		2.588.643.215,00		2.756.701.310,00		2.816.108.952,00		2.826.296.813,00		
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	30	30	2.918.799.311,00	30	2.588.643.215,00	30	2.756.701.310,00	30	2.816.108.952,00	30	2.826.296.813,00		
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				200.024.269,00		179.285.635,00		190.290.547,00		194.373.961,00		195.325.905,00		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				200.024.269,00		179.285.635,00		190.290.547,00		194.373.961,00		195.325.905,00		
Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100	90	200.024.269,00	100	179.285.635,00	100	190.290.547,00	100	194.373.961,00	100	195.325.905,00	2.16.2.20.2.21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100	90		100		100		100		100			
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				200.024.269,00		179.285.635,00		190.290.547,00		194.373.961,00		195.325.905,00		
Terlaksananya penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Salatiga	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan	100	100	200.024.269,00	100	179.285.635,00	100	190.290.547,00	100	194.373.961,00	100	195.325.905,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TH 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	rekendasi dari pembina data statistik (%)			74.644.122,00		48.846.408,00		50.085.557,00		51.435.790,00		51.717.976, 00		
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadada, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	100	100				100				100			
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	100	100				100				100			
	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	50	50				50				50			
Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekendasi dari pembina data statistik (%)	100	100	74.644.122,00	100	48.846.408,00	100	50.085.557,00	100	51.435.790,00	100	51.717.976, 00		
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				14.244.122,00		11.846.411,00		15.234.890,00		14.458.440,00		13.817.977, 00		
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadada, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	100	100	14.244.122,00	100	11.846.411,00	100	15.234.890,00	100	14.458.440,00	100	13.817.977, 00		
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				85.744.120,00		75.846.408,00		80.484.800,00		82.702.590,00		83.817.976, 00		
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	100	100	85.744.120,00	100	75.846.408,00	100	80.484.800,00	100	82.702.590,00	100	83.817.976, 00		
2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				25.391.905,00		42.746.408,00		44.485.300,00		45.777.141,00		45.971.976, 00		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	50	50	25.391.905,00	50	42.746.408,00	50	44.485.300,00	50	45.777.141,00	50	45.971.976, 00		
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				133.784.516,00		119.913.658,00		127.274.200,0 0		130.005.356,00		130.642.056 ,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TH 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				133.784.516,00		119.913.658,00		127.274.200,0 0		130.005.356,00		130.642.056 ,00		
Meningkatnya keamanan siber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah	Persentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi (%)	70,85	70,09	133.784.516,00	71,05	119.913.658,00	71,1	127.274.200,0 0	71,15	130.005.356,00	71,2	130.642.056 ,00	2.16.2.20.2. 21.13.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				133.784.516,00		119.913.658,00		127.274.200,0 0		130.005.356,00		130.642.056 ,00		
Prosentase Orghnasisasi perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	30	30	133.784.516,00	30	119.913.658,00	30	127.274.200,0 0	30	130.005.356,00	30	130.642.056 ,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				109.671.071,00		101.500.000,00		104.000.000,0 0		106.405.356,00		106.511.800 ,00		
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1	1	109.671.071,00	1	101.500.000,00	1	104.000.000,0 0	1	106.405.356,00	1	106.511.800 ,00		
2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				10.000.700,00		8.413.658,00		10.500.000,00		10.800.000,00		10.930.256, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TH 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	30	30	10.000.700,00	30	8.413.658,00	30	10.500.000,00	30	10.800.000,00	30	10.930.256, 00		
2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				14.112.745,00		10.000.000,00		12.774.200,00		12.800.000,00		13.200.000, 00		
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	1	1	14.112.745,00	1	10.000.000,00	1	12.774.200,00	1	12.800.000,00	1	13.200.000, 00		
2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Terlaksananya penetapan pola hubungan komunikasi sandi di Kota Salatiga				0		0		0		0		0		

4.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah ukuran kinerja strategis yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan Dinas Kominfo dalam mencapai tujuan, sasaran, dan kinerja utama sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam satu periode tertentu.

IKU Dinas Kominfo berfungsi untuk:

1. Mengukur hasil (outcome) dan dampak pelaksanaan program/kegiatan Kominfo, bukan hanya output administratif.
2. Menjadi alat akuntabilitas kinerja, khususnya dalam penyusunan LAKIP, LKPJ, dan evaluasi SAKIP.
3. Menjabarkan tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam RPJMD, Renstra OPD, dan Renja.
4. Menjadi dasar pengambilan keputusan, perbaikan kebijakan, dan peningkatan kualitas layanan informasi dan digitalisasi pemerintahan.

Indikator Kinerja Utama pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana Tabel 4. berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Satuan	Formulasi / Rumus	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pemeintah Digital	Nilai	IPD (%) = $\frac{\text{Nilai maksimum skala}}{\text{Nilai IPD yang dicapa i}} \times 100\%$	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5
2	Indeks Kematangan Pembangunan Statistik	Nilai	IKPS (%) = $\frac{\text{Nilai maksimum skala}}{\text{Nilai IKPS yang dicapai}} \times 100\%$	2,61	2,61	2,63	2,63	2,64	2,64	2,65
3	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	TKIP = $\frac{\text{Jumlah aspek}}{\sum \text{Nilai seluruh aspek}}$	90,5	90,75	91	91,25	91,5	91,75	91,75

4.5 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, atau fungsi tertentu yang menjadi penentu (kunci) tercapainya sasaran organisasi.

Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator yang:

- Fokus pada aspek-aspek kritis dari suatu program/kegiatan
- Digunakan untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan kinerja
- Menjadi penghubung antara aktivitas (output) dan hasil yang diharapkan (outcome)
- IKK diturunkan dari Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Kunci pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana table berikut :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Satuan	Formulasi/Rumus	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Prosentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	Jumlah masyarakat sasaran yang mengetahui kebijakan dan program prioritas / Jumlah total masyarakat sasaran penyebaran informasi publik x 100%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	Jumlah OPD yg terhubung dengan akses internet Kominfo / Jumlah total OPD di lingkungan Pemerintah DaerahJumlah OPD yang terhubung dengan akses internet Kominfo × 100%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	Jumlah pelayanan publik yg diselenggarakan secara online dan terintegrasi / Jumlah seluruh Pelayanan publik x 100%	100	100	100	100	100	100	100



No	Indikator	Satuan	Formulasi/Rumus	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	Jumlah OPD yg menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah / Jumlah seluruh OPD x 100%	100	100	100	100	100	100	100
5	Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	Jumlah OPD yg menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah / Jumlah seluruh OPD x 100%	100	100	100	100	100	100	100
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	Nilai tingkat kematangan keamanan informasi maksimum / Nilai tingkat kematangan keamanan informasi daerah yang dica pai x 100%	70,85	70,9	71,05	71,1	71,15	71,2	70,85

BAB V

PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2025-2029 telah memperhatikan aspek normatif yang diatur dalam peraturan perundangan. Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Penyusunan Renstra ini mengacu pada dokumen-dokumen yang secara hierarkis lebih tinggi yaitu RPJPD Kota Salatiga yang masih berlaku, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Badan Siber dan Sandi Negara serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, implementasi Renstra ini harus memperhatikan kaidah berikut:

1. Renstra ini merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan. Dengan demikian akan terjadi kesamaan arah pembangunan selama lima tahun ke depan.
2. Renstra ini akan menjadi dasar penyusunan Renja yang bersumber dari APBD maupun APBN.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

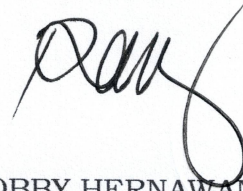
Kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan Renstra ini adalah sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renstra ini dengan sebaik-baiknya.
 2. Renstra ini menjadi acuan bagi Sekretariat dan Bidang-Bidang dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga.
 3. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program serta kegiatan renstra, diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah khususnya sektor komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
 4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga dapat dilakukan perubahan apabila ada perubahan kebijakan di tingkat nasional dan daerah.
-

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Renstra di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga tahun 2025-2029 untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 dan untuk menjamin pelaksanaan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melaksanakan pengendalian.

WALI KOTA SALATIGA



ROBBY HERNAWAN